

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik*

Oleh :

AHMAD ZUBEIR RANGKUTI

NPM : 2020050027



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : AHMAD ZUBEIR RANGKUTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020050027

Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Sektor Publik

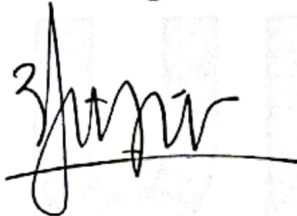
Judul Tesis : ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pengesahan Tesis:

Medan, 26 Agustus 2022

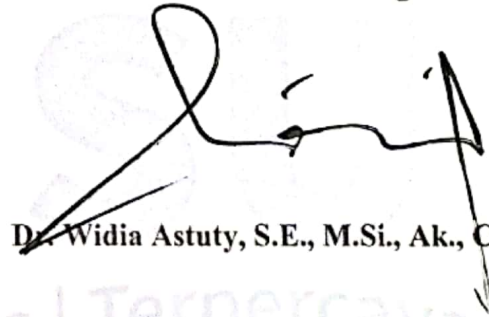
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II



Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

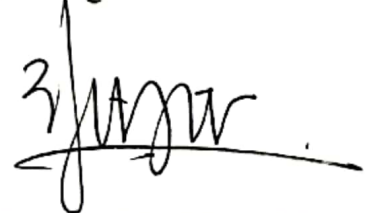
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

PENGESAHAN

ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

AIMAD ZUBEIR RANGKUTI

NPM : 2020050027

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Komisi Penguji Yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Pada Hari Jumat, 26 Agustus 2022

Komisi Penguji

1. Dr. IRFAN, S.E.,M.M
Ketua

1.....

2. Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI., S.E.,M.Si, Ak, C.A
Sekretaris

2.....

3. Dr. Zulia Hanum, SE.,M.Si
Anggota

3.....

PERNYATAAN

ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2022

Peneliti



AHMAD ZUBEIR RANGKUTI
NPM : 2020050027

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Ahmad Zubeir Rangkuti
NPM : 2020050027**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD), dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasinya.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada OPD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Metode penentuan sampel dengan metode sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah 35 OPD yang masing-masing terdiri dari 3 orang responden dengan total responden sebanyak 105 orang. Data diolah menggunakan metode SEM dengan bantuan alat analisis *Smart PLS*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pemanfaatan SIKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, peran APIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian SPIP tidak dapat memoderasi masing-masing pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan SIKD dan peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Penerapan SAP, Komptensi SDM, Pemanfaatan SIKD, Peran APIP, SPIP, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**ANALYSIS OF QUALITY DETERMINANTS OF FINANCIAL
STATEMENTS OF REGIONAL GOVERNMENTS WITH GOVERNMENT
INTERNAL CONTROL SYSTEM AS MODERATING VARIABLES IN
MANDAILING DISTRICT GOVERNMENTS**

Ahmad Zubeir Rangkuti

NPM : 2020050027

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the factors that affecting the quality of financial statements in the Government of Mandailing Natal District. The factors that influence it are the implementation of government accounting standards (SAP), human resource competencies (HR), utilization of the local financial information system (SIKD), and the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), with the moderating variables is the government's internal control system (SPIP).

The type of research in this study is causal associative using primary data and data collection techniques through the distribution of questionnaires in regional device organizations of Mandailing Natal, North Sumatera, Indonesia. The method of determining the sample with the census method, so that the entire population is used as a research sample. The population of this study was 35 regional device organizations, each consisting of 3 respondents with total 105 respondents. Data is processed using SEM method with Smart PLS analysis tools.

The results of this study prove that the implementation of SAP has an effect on the quality of the Mandailing Natal District Government's financial statements, HR competencies have an effect on the quality of the Mandailing Natal District Government's financial statements, the utilization of SIKD has a an effect on the quality of the Mandailing Natal District Government's financial statements, the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has an effect on the quality of the Mandailing Natal District Government's financial statements. Then SPIP does not moderate each of the effects of SAP implementation, HR competencies, utilization of SIKD and the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the quality of the Mandailing Natal District Government's financial statements.

Keyword: Implementation of SAP, HR competency, Utilization of SIKD, The role of APIP, SPIP, Quality of local government financial statements.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal**”. Adapun tesis ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum.**, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. **Bapak Prof. Dr. Akrim, S.H.,M.Pd.**, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos.,M.Si.**, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. **Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. **Ibu Dr. Eka Nurmala, S.E., M.Si., Ak., CA.,** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Komisi Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. **Ibu Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,** selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu, dukungan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
8. **Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI.,** selaku Komisi Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
9. **Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M.,** selaku Komisi Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
10. **Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.,** selaku Komisi Penguji yang telah memberikan ilmu, dukungan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
11. **Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi** di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. **Orangtua tercinta (Bapak Suardi Rangkuti dan Ibu Nur Adiah Rangkuti)** yang selalu memberikan dukungan dalam doa, beserta saudara-saudara terkasih yang sepenuh hati memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah hingga

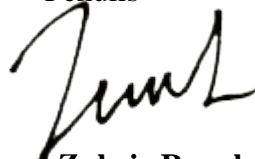
selesainya penulisan tesis ini, dan seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan doanya kepada penulis.

13. **Teman-teman satu angkatan di Magister Akuntansi**, khususnya Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang memberi semangat serta bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan menyertai kita semua.

Medan, 26 Agustus 2022

Penulis



Ahmad Zubeir Rangkuti
2020050027

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	17
1.3 Rumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan Penelitian.....	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	21
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	25
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	29
2.1.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	36
2.1.6 Peran APIP.....	39
2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	43
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan.....	50
2.3 Kerangka Berpikir.....	53
2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	

Daerah.....	54
2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	56
2.3.4 Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	57
2.3.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	58
2.4 Hipotesis.....	61
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Pendekatan Penelitian.....	62
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	63
3.2.1 Tempat Penelitian.....	63
3.2.2 Waktu Penelitian.....	63
3.3 Populasi Dan Sampel.....	63
3.3.1 Populasi Penelitian.....	63
3.3.2 Sampel Penelitian.....	64
3.4 Defenisi Operasional Variabel.....	65
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6 Teknik Analisis Data.....	75
3.6.1 Uji Kualitas Data.....	78
3.6.2 Analisis Inner Model.....	79
3.6.3 Uji Hipotesis.....	80
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Hasil Penelitian	82
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	82
4.1.2 Tingkat Pengembalian Responden.....	82
4.1.3 Deskripsi Data.....	83
4.1.3.1 Karakteristik Responden.....	83

4.1.3.2	Karakteristik Jawaban Responden	84
4.1.4	Analisis Outer Model.....	97
4.1.4.1	<i>Validity Item</i>	97
4.1.4.2	<i>Discriminant Validity</i>	98
4.1.4.3	Uji Reliabilitas	100
4.1.5	Analisis Inner Model	101
4.1.6	Pengujian Hipotesis	102
4.1.6.1	Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Langsung....	103
4.1.6.2	Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Tidak Langsung	105
4.2	Pembahasan	107
4.2.1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	107
4.2.2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	110
4.2.3	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	112
4.2.4	Pengaruh Peran APIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan	115
4.2.5	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	118
4.2.6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	121
4.2.7	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	123
4.2.8	Pengaruh Peran APIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah..	126
BAB 5	PENUTUP.....	129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.....	9
Tabel 1.2	Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan.....	12
Tabel 1.3	Perkembangan Hasil Temuan BPK atas Kelemahan SPI.....	14
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian.....	63
Tabel 3.2	Daftar OPD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.....	64
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	67
Tabel 3.4	Pemberian Skor Jawaban Skala Rating.....	71
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	72
Tabel 3.6	Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP.....	72
Tabel 3.7	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM.....	73
Tabel 3.8	Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan SIKD.....	73
Tabel 3.9	Hasil Uji Validitas Variabel Peran APIP.....	73
Tabel 3.10	Hasil Uji Validitas Variabel SPIP.....	74
Tabel 3.11	Hasil Uji Reabilitas.....	75
Tabel 4.1	Deskriptif Responden.....	83
Tabel 4.2	Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden.....	84
Tabel 4.3	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	85
Tabel 4.4	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah.....	87
Tabel 4.5	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	89
Tabel 4.6	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemanfaatan System Informasi Keuangan Daerah.....	91
Tabel 4.7	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pera APIP.....	93
Tabel 4.8	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	95
Tabel 4.9	Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	97

Tabel 4.10 <i>Discriminant Validity</i>	99
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	101
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>R-Square</i>	102
Tabel 4.13 <i>Path Coefficient</i>	103
Tabel 4.14 <i>Specific Indirect Effects</i>	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	60
Gambar 3.1 Model Struktural PLS.....	77
Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Responden Dapat Dibandingkan.....	86
Gambar 4.2 Persentasi Jawaban Responden Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintah.....	88
Gambar 4.3 Persentasi Jawaban Responden Pengetahuan.....	90
Gambar 4.4 Persentasi Jawaban Responden Meningkatkan Efisiensi.....	92
Gambar 4.5 Persentasi Jawaban Responden Pengawasan Adminitrasi Pemerintah	94
Gambar 4.6 Persentasi Jawaban Responden Lingkungan Pengendalian	96
Gambar 4.7 Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model.....	98
Gambar 4.8 Path Coefficient.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Penelitian Terdahulu

Lampiran 2 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 Model Struktural PLS

Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 6 Hasil Pengujian Data

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Yuesti, dkk. 2020).

Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada *stakeholder*. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menjadi acuan dalam penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Sebuah laporan keuangan akan dikatakan berkualitas jika telah memenuhi unsur-unsur atau

karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Karakteristik Informasi yang relevan dalam Laporan Keuangan, apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, dan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, serta lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik Informasi yang andal, apabila penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan

lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda, netralitas yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Sementara kriteria dapat dibandingkan yaitu apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Kriteria terakhir, dapat dipahami yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna “Laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Erniati, 2019), Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Sulteng”

Pemerintah harus membuat laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta sarana evaluasi kinerja.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam penyusunan laporan keuangannya, pemerintah daerah mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kualitas laporan keuangannya dikategorikan baik. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan

bahwa pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola entitas publik (Aruan, 2019).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Dikutip dari siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan JAKARTA, Selasa (10 November 2020) - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyebutkan bahwa berdasarkan tingkat pemerintahan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai oleh seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Opini WTP juga dicapai oleh 364 dari 415 pemerintah kabupaten, dan 87 dari 93 pemerintah kota. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Hal ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 yang disampaikan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, pada Selasa (10/11). Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 680 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 LHP keuangan, 7 LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu.

Pada semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa 541 dari 542 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Pada saat IHPS ini disusun, satu pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Jumlah opini WTP mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD tahun 2018 yaitu 82%.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun ada yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini dari WTP menjadi WDP diperoleh Pemkot Subulussalam, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Konawe Selatan. Sedangkan penurunan opinidari WDP menjadi TMP diperoleh Pemkab Jember dan Pemkab Pulau Taliabu.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I tahun 2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar.

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda. Hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target

program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019; upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemandapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019; Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemandapan jalan TA 2019; pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan; serta Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019.

Berdasarkan IHPS I tahun 2021, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 486 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 49 LKPD (9%), opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 4 (0,7%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,3%) LKPD.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 365 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 88 dari 93 pemerintah kota (95%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91%, 77%, dan 91% di tahun 2020. Capaian ini merupakan hasil usaha pemda dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama

target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, jumlah LKPD Tahun 2020 yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Pada LKPD Tahun 2019, sebanyak 485 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2020 sebanyak 486 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP

Dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 20 poin persen, yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 90% pada LKPD Tahun 2020. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebesar 3,3 poin persen dari 4% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 0,7% pada LKPD Tahun 2020. Meskipun demikian, pada LKPD Tahun 2020 terdapat 2 (0,3%) LKPD yang memperoleh opini TW dimana pada 4 tahun sebelumnya tidak pernah ada LKPD yang memperoleh opini TW. Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2019. Penurunan opini pada LKPD Tahun 2020 terjadi pada pemerintah provinsi (Pemprov) dari 34 (100%) menjadi 33 (97%) LKPD. Kenaikan opini terjadi pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 364 (88%) menjadi 365 (88%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 87 (94%) menjadi 88 (95%) LKPD. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP pada 19 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas

permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Dalam Konstelasi regional, Kabupaten Mandailing Natal berada di bagian selatan wilayah Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut (dpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan
- Selatan – Provinsi Sumatera Barat
- Barat – Samudera Indonesia
- Timur – Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten yang ber-ibukota di Panyabungan ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 407 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 ha.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, penggunaan teknologi informasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam lingkup pengelolaan keuangan hingga penyajian laporan keuangan, dan peran auditor internal dalam seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan objek dan tempat dari penelitian ini memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2015 s.d tahun 2019 (BPKP, 2020). Sedangkan untuk tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dikutip dari Berita Madina yang rilis pada Kamis, 29 Juli 2021, “Berdasarkan hasil audit BPK RI, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali memperoleh penilaian opini WDP terhadap laporan keuangan 2020. Pemberian penilaian ini disebabkan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang dalam pengelolaan uang negara, dan saya ingatkan setiap OPD menyadari ini sekaligus saya mengharapkan kolaborasi dan sinergitas OPD untuk sama-sama patuh dan memahami pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, sehingga di masa mendatang Kabupaten Mandailing Natal akan memperoleh memperoleh opini WTP yang merupakan keinginan kita bersama,” Ujar Bupati secara tegas.

Tabel 1.1
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

No	Tahun	Opini Audit
1	2015	WDP
2	2016	WDP
3	2017	WDP
4	2018	WDP
5	2019	WDP
6	2020	WDP
7	2021	WDP

Sumber: sumut.bpk.go.id

Melalui penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat dikatakan baik. Hal tersebut memicu keinginan penulis dalam meneliti faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adapun faktor pertama yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP adalah suatu rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari (2021), Sri Wineh, Tommy Ferdian & Novianti (2019), Azlim, Darwanis & Bakar (2012), Wati, Kadek Desiana (2014), Suwanda (2015) dan Saragih (2016) yang menyebutkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian Aruan (2019) menyebutkan bahwa penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh. Namun penelitian oleh Desmaria Puji Kesuma, Anwar, & Darmansyah (2017) dan Sianturi (2016) menyebutkan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang aparatur sipil negara (ASN)

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN Nomor 46A, 2007).

SDM yang baik adalah yang mempunyai pengetahuan bagaimana cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan mengetahui dengan jelas standar-standar yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari & Maya Sari (2021), Aruan (2019), Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Siahaya, Asnawi & Layuk (2011), Rahmatika & Alfiah (2014) dan Ayu, Kiranayanti, Made & Erawati (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tidak demikian dengan Syarifudin (2014) yang menyatakan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian Sukmaningrum (2012) menyatakan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu bentuk kompeten SDM dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK-RI, hal ini menunjukkan SDM sudah mahir dalam mengelola sebuah laporan keuangan. Berikut adalah daftar jumlah temuan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan yang mencakup tentang masalah proses penyusunan serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Temuan BPK-RI Berkaitan dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

No	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan pelaporan	2017	2018	2019	2020
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat	800	938	916	1.018
2	Proses penyusunan tidak sesuai Ketentuan	938	603	494	477
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai & Entitas terlambat menyerahkan laporan	345	285	319	204
Jumlah		2.083	1.826	1.729	1.699

Sumber : IHPS I 2018, IHPS 1 2019, IHPS 1 2020, dan IHPS 1 2021 (BPK RI)

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). SIKD dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas. Proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik terselenggara melalui pemerintah pusat dan daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan

menggunakan kemajuan teknologi informasi (Ahmad Yani, 2008). Hal ini didukung oleh penelitian Aruan (2019), Muda et al. (2018), Yuliani & Bakar (2010), Siahaya et al. (2011) dan Wati, Kadek Desiana (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian Diani (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah peran APIP. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Penelitian Yuliani & Bakar (2010) menyebutkan bahwa auditor internal adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi entitas. Dengan demikian auditor internal membantu entitas dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan entitas. Peran auditor internal yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Aruan (2019), Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah (2020), Aruan (2019), Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Yuliani & Bakar (2010), Diani (2014) dan Saragih (2016) yang menunjukkan peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian Adha Inapty & Martiningsih (2016) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berikut perkembangan hasil temuan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern selama empat tahun terakhir perhatikan tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Hasil Temuan BPK atas Kelemahan SPI

No	Kelompok Permasalahan	2017	2018	2019	2020
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja	2.887	2.753	2.338	2.498
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.252	1.279	1.108	1.170
Jumlah		4.139	4.032	3.446	3.668

Sumber : IHPS I 2018, IHPS I 2019, IHPS I 2020 dan IHPS I 2021 (BPK RI)

Faktor kelima adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan (Indonesia, 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, setiap instansi pemerintah berkewajiban

menerapkan SPIP dalam kegiatannya. Penerapan SPIP dengan baik dan benar akan meningkatkan citra instansi pemerintah karena mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, menampilkan laporan keuangan yang andal, serta menghindarkan negara dari kerugian karena memiliki SDM yang taat pada peraturan. Jika pemerintah daerah sendiri mempunyai sistem pengendalian intern pemerintah yang kurang baik maka bagaimana kualitas laporan keuangannya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian intern pemerintahnya baik maka kualitas laporan keuangannya juga akan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari & Maya Sari (2021), Afiah & Azwari (2015), Sukmaningrum (2012), penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Dewi (2017) dan Syarifudin (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sri Winch, Tommy Ferdian dan Novianti (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Marangin dan Penelitian Dewi (2017) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi hubungan standar akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa

variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh audit internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh S Purnomo (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern bukanlah pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitian Aruan (2019), Adha Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Adha Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Barus (2017), Jauhari & Hazisma (2021), Fathurrahman & Suwarno (2019), Arista (2018) dan Kapriana & Agung (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan di antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Aruan (2019), Syarifudin (2014) yang menyatakan bahwa SPIP tidak signifikan dalam pengaruh peran audit intern terhadap kualitas LKPD.

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dan fenomena yang telah dijelaskan dari berbagai sumber resmi, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sejak tahun 2015 sd 2021 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah mendapatkan opini WTP oleh BPK. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat dikategorikan baik.

Permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisan ini akan membahas mengenai “Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”.

Berikut ini adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Penerapan SAP yang belum baik pada penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
2. Kompetensi sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang belum baik pada penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
4. Peran APIP dalam pengawasan dan penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apakah peran APIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
5. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah mampu memoderasi hubungan penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
6. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing?
7. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah mampu memoderasi hubungan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?
8. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah mampu memoderasi hubungan peran APIP dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dijelaskan tujuan penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern

pemerintah sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta kajian akademik khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik terutama dalam hal penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

3. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh calon peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011).

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Defenisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas merupakan totalitas dari karakteristik sesuatu yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Jadi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan totalitas dari bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Menurut (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, n.d.) mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2. Manfaat dan Tujuan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009) yaitu:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and retrospective reporting*)
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and authorization*)

information)

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
5. Hubungan Masyarakat (*Public relation*)
6. Sumber fakta dan gambaran (*Source of facts and figures*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Perubahan Ekuitas

3. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik: memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*), memberikan manfaat prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu (*timeliness*) dan lengkap. Informasi disajikan tepat waktu agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur (*faithfulness of presentation*), dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan mampu memberikan manfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah. Maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang kompeten.

2.1.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Defenisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi Standar Pemerintahan (ASP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan. Peraturan Pemerintahan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Standar akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Manfaat dan Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan mengacu pada standar akuntansi dimana pemerintah pusat mengacu pada peraturan menteri keuangan sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. Bastian (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan sangat dibutuhkan dalam rangka pembuatan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat

(1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. CaLK merupakan laporan yang merinci lebih lanjut pos-pos laporan pelaksanaan anggaran dan maupun laporan finansial yang tidak terpisahkan dari laporan tersebut.

3. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Permadi, 2013) indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- b. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum

- c. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan penelitian I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra dan Dodik Ariyanto (2015) bahwa factor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia
2. Komunikasi
3. Komitmen organisasi
4. Gaya kepemimpinan

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari (2021) yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Sri Winch, Tommy Ferdian, dan Novianti (2019) yang menunjukkan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian Aruan (2019) yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD yang juga sejalan dengan penelitian Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) yang

menyatakan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Defenisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel di mata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik/rata-rata. Menurut Spencer (1993) kompetensi terdiri dari lima karakteristik, yaitu: *Knowledge, Skills, Motives, Traits* (sifat), *Self Concept* (konsep diri).

Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yang dalam penelitian ini maksudnya adalah Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

2. Manfaat dan Tujuan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ruky (dalam Sutrisno, 2012: 208) mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi sumber daya manusia didalam suatu organisasi digunakan atas berbagai alasan, yaitu :

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.

Dalam model ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang SDM.

2. Alat seleksi karyawan.

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, perusahaan dapat mengarahkan pada sasaran selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.

3. Memaksimalkan produktivitas.

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan perusahaan untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk

dimobilisasikan secara vertical maupun horizontal.

4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi.

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baruterus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

3. **Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007, indikator kompetensi sumber daya manusia (pegawai) adalah sebagai berikut:

- 1 Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai

tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.

- 2 Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- 3 Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala risikonya.

Menurut Xu, et. al. (2003) indikator untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia yaitu pemahaman terhadap peraturan dan standar, interaksi dengan sistem, kontrol terhadap sumber daya manusia, serta pendidikan dan pelatihan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:102) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan banyak pekerja bahwa manajemen merupakan musuh yang akan mencegah mereka melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan. Demikian pula apabila manajer merasa bahwa mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh, mereka tidak meningkatkan usaha dan energi untuk mengidentifikasi tentang bagaimana mereka harus memperbaiki

sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespons dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi bawahan. Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi menyebabkan orientasi pada hasil, kemampuan mempengaruhi orang lain, serta meningkatkan inisiatif. Peningkatan kompetensi akan meningkatkan kinerja bawahan dan kontribusinya pada organisasi akan meningkat.

6. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Mengatasi pengalaman yang tidak menyenangkan akan memperbaiki penguasaan dalam banyak kompetensi.

7. Kemampuan intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

- b. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, untuk mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- c. Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- d. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- e. Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan kompetensi.
- f. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- g. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- h. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heri

Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari (2021) dan Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhsyarsyah (2020) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antar variabel tersebut. Sejalan juga dengan penelitian Aruan (2019) dan Rangkuti (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Kemudian juga oleh Dewi (2017) kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.5. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

a. Defenisi Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD. IKD yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis-jenis IKD yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca Daerah

3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiscal dan kapasitas fiscal daerah

b. Manfaat dan Tujuan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan daerah

SIKD diselenggarakan oleh Menteri Keuangan secara nasional dan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi pengembangan SIKD
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah

Pada pemerintahan daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan

daerah

3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional

c. Indikator Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Aruan (2019) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Mempertinggi efektivitas
2. Menjawab kebutuhan informasi
3. Meningkatkan kinerja
4. Meningkatkan efisiensi

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Gusforni (2011), kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut :

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Muda et al. (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada kualitas laporan keuangan. Sama halnya penelitian Aruan (2019) yang menunjukkan bahwa secara parsial pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Siahaya et al. (2011) juga menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Demikian pula dengan penelitian Wati, Kadek Desiana (2014) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.1.6. Peran APIP

1. Defenisi Peran APIP

Internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi (The Institute of Internal Auditor, 1998). Internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Dapat

disimpulkan bahwa peran auditor internal dikatakan bebas dan tidak memihak atau independen jika auditor internal dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Peran auditor internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota/kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada walikota/bupati.

2. Manfaat dan Tujuan Peran APIP

Tujuan utama dari inspektorat menurut Tim Penyusun STAN (2007) adalah membantu pemerintah daerah dan OPD dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mereviu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif
2. Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah
3. Mereviu keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut

4. Mereviu sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan
5. Mereviu alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut
6. Menilai tingkat efesiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul
7. Mereviu kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana
8. Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif
9. Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (bpk).

3. Indikator Peran APIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan

bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a. Melakukan pengawasan administrasi pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan pengawasan urusan pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kota/kabupaten. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung- jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di kota/kabupaten dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang disebut inspektorat kota/kabupaten. Inspektorat kota/kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kota/kabupaten yang didanai dengan APBD kota/kabupaten.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya, APIP memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direviu.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran APIP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya Yuda Krisnanto Putra (2017) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas auditor internal adalah sebagai berikut :

1. Dukungan manajemen
2. Kompetensi auditor
3. Independensi auditor
4. Persepsi *auditee*

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penelitian oleh Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhsyarsyah (2020) yang menunjukkan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Sama halnya dengan penelitian Aruan (2019) yang menyatakan peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan itu, penelitian Syarifudin (2014) menunjukkan peran auditor internal memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Defenisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah, kepala dinas OPD wajib menerapkan setiap unsur dari SPIP. Untuk memastikan bahwa SPIP tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Kepala dinas OPD melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas SPIP serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola.

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Menurut Inapty dan Martiningsih (2016: 33) Sistem pengendalian internal adalah suatu prasyarat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola aset negara secara amanah. SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang dijalankan dengan maksimal akan mendorong sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal akan lebih berguna apabila didukung dengan penerapan

standar akuntansi pemerintah sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan menjadi berkualitas. Dengan demikian, semakin baik penerapan SAP dan diperkuat dengan sistem pengendalian internal yang memadai maka akan menghasilkan keluaran berupa kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.

2. Manfaat dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang diungkapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organization treadway*), penelitian COSO (*Committee of Sponsoring Organization treadway*) mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalianintern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses inimenjadi tidak sempurna.

3. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud diciptakan oleh pimpinan instansi pemerintah yang merupakan dasar fondasi SPIP melalui :

- Penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar.
- Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang.
- Kepemimpinan yang kondusif.
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Meliputi :

- Identifikasi risiko

- Analisis risiko

Penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena risiko merupakan sesuatu yang ada unsur ketidakpastian dan tidak pasti kapan akan terjadi.

3. Kegiatan pengendalian

Penerapan kegiatan pengendalian menurut pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 tahun 2008 sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan

4. Informasi dan Komunikasi

Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar strata pemerintahan dan/atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam

mencapai tujuan dan/atau kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan baik. Terdiri dari :

- Sarana Komunikasi
- Sistem Informasi

5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah.

Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut: “Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh :

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan”

Susanto (2010:117) menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan sistem pengendalian intern yang disebabkan oleh:

1. Kesalahan manusia (*Human error*) Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Penyimpangan Manajemen
Karena manajer atau suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
3. Kolusi (*Collusion*) Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkolusi untuk melakukan pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja.
4. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*) Konsep jaminan yang

meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut”.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) menyatakan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian Rosidiani (2011) dan Ekawati (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial dan simultan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan berisi tentang data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari (2021)	<i>Factors Affecting the Quality of Financial Reports in the Government of</i>	Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Statement.</i> Variabel Independen:	<i>Based on the research results, The Application of SAP has an effect on the Quality of Financial Reports. The Quality of Human Resources affects the Quality</i>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Langkat Regency</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SAP Implementation - HR Capacity - Application of SPIP - IT Utilization - BMD Management 	<i>of Financial Reports. The Application of SPIP affects the Quality of Financial Reports. The Use of IT affects the Quality of Financial Reports. BMD Management affects the Quality of Financial Reports.</i>
Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<p>Variabel Dependent: Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Sumber Daya Manusia - Peran Internal Audit - Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan (2) Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial (3) Kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal, Kesuksesan Penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Hicca Maria Gandhi Putri Aruan (2019)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SAP - Kompetensi SDM - Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah - Peran Auditor Internal <p>Variabel Moderating: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemahaman SIKD berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Peran Auditor Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pemerintah Kabupaten Simalungun. Sedangkan SPIP tidak dapat memoderasi masing-masing pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Siti irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah (2019)	<i>The Effect Of Competence Of Human Resources And The Internal Audit Role Of The Quality Of Financial Statements (Study in the Provincial and Regency / City Governments of North Sumatra)</i>	Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Statements.</i> Variabel Independen: - <i>Human Resource Competence</i> - <i>Role of Internal Audit</i>	<i>Results research this to show that (1) HR competencies and the role of internal audit do not partially affect the success of the application of SIKD (2) HR competencies, Internal Audit Roles have no effect simultaneously to Success Application SIKD (3) the competence of human resources and the role of internal audit partial effect on the quality of the financial report.</i>
Nunung Sri Wahyuni; Muhyarsyah; Eka Nurmala Sari (2019)	<i>The Influence Of The Government's Internal Control Sistem And The Availability Of Budgets On The Quality Of Financial Statement (Case Study in local governments in North Sumatra)</i>	Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Statements.</i> Variabel Independen: - <i>Internal Control Sistem of Government</i> - <i>Availability Budget</i>	<i>The results of this study suggest that (1) The Sistem of Internal Control of Government Influence on The Quality of Financial Statement., (2) The Availability of The Budget does not have an effect on The Quality of Financial Statement., (3) Simultaneous Control Systems the Government's Budget and The Availability of Internal influence on The Quality of Financial Statement.</i>
Erviana (2019)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>The test result find that: a) The Implementation of Local Management Information Sistem and Controlling Activities have significancy influence on The Quality</i>

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palu	Variabel Independen: - Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah - Kegiatan Pengendalian	<i>Financial Statements. b) The Implementation of Local Management Information Sistem has positive but insignificant influence on The Quality Financial Statements. This is shown by coefficient regression value of 0.089 or 0,89 % with significant value of 0,090. c) Controlling Activity has significant influence of The Quality of Financial Statements with coefficient regression value of 0.190 or 19,0 % and significant value at 0,000.</i>
Muda et al., (2018)	Factors Of Quality of Financial Report Of Local Government in Indonesia	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: - Sistem Informasi Akuntansi - Kualitas Internal Kontrol	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Sedangkann Internal Kontrol tidak mempunyai pengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah.
Nirwana dan Haliah (2018)	<i>Determinant Factor Ff The Quality Of Financial Statements And Performance Of The Government By Adding Contextual Factors</i>	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: - Faktor Pribadi - Sistem/faktor Administrasi - Faktor Politik	Kompetensi Faktor Pribadi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Peraturan Faktor Sistem / Administrasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Faktor-faktor Politik mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

Sumber: Berbagai Sumber Penelitian

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari

penelitian yang sedang diteliti.

2.3.1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SAP merupakan pedoman dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Republik Indonesia, 2010). Hal ini berarti semakin baik penerapan SAP didalam suatu laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari & Maya Sari (2021), Azlim, Darwanis & Bakar (2012), Wati, Kadek Desiana (2014), Suwanda (2015) dan Saragih (2016) yang menyebutkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian Aruan (2019) menyebutkan bahwa penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh.

2.3.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Semakin kompeten sumber daya manusia dalam suatu entitas maka diharapkan semakin baik pula

kualitas laporan keuangannya agar dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut teori kegunaan keputusan dalam rangka pengambilan keputusan, mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh SDM dalam suatu pemerintah daerah selaku penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam hal ini, artinya SDM tersebut harus mampu dan memiliki karakteristik yang terampil guna menyajikan informasi akuntansi dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut secara profesional.

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menurut Wahyono (2004) menyatakan bahwa: “Dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya mengasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, sehingga dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).”

Hal ini sejalan dengan penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari & Maya Sari (2021), Aruan (2019), Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Siahaya, Asnawi & Layuk (2011), Rahmatika & Alfiah (2014) dan Ayu, Kiranayanti, Made & Erawati (2016) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Sonny Loho & Sugiyanto, 2004). Dengan kata lain, hasil dari paham sistem informasi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut teori kegunaan keputusan hubungan antara pemanfaatan SIKD terhadap kualitas laporan keuangan digambarkan melalui adanya pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang

mengamati adanya dukungan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana teori kegunaan keputusan mencakup syarat dari kualitas informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Hal ini didukung oleh penelitian Muda et al. (2018), Aruan (2019), Yuliani & Bakar (2010), Siahaya et al. (2011) dan Wati, Kadek Desiana (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.3.4. Pengaruh Peran APIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota/kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD, inspektorat melakukan reviu terhadap laporan keuangannya.

Pada teori kegunaan keputusan mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan

menggunakannya. Dalam hal ini auditor internal berperan untuk menentukan salah satu komponen yaitu keandalan yang dihasilkan dari informasi akuntansi agar berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah (2020), Aruan (2019), Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Yuliani & Bakar (2010), Diani (2014) dan Saragih (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.3.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran APIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang menyeluruh pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan baik pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

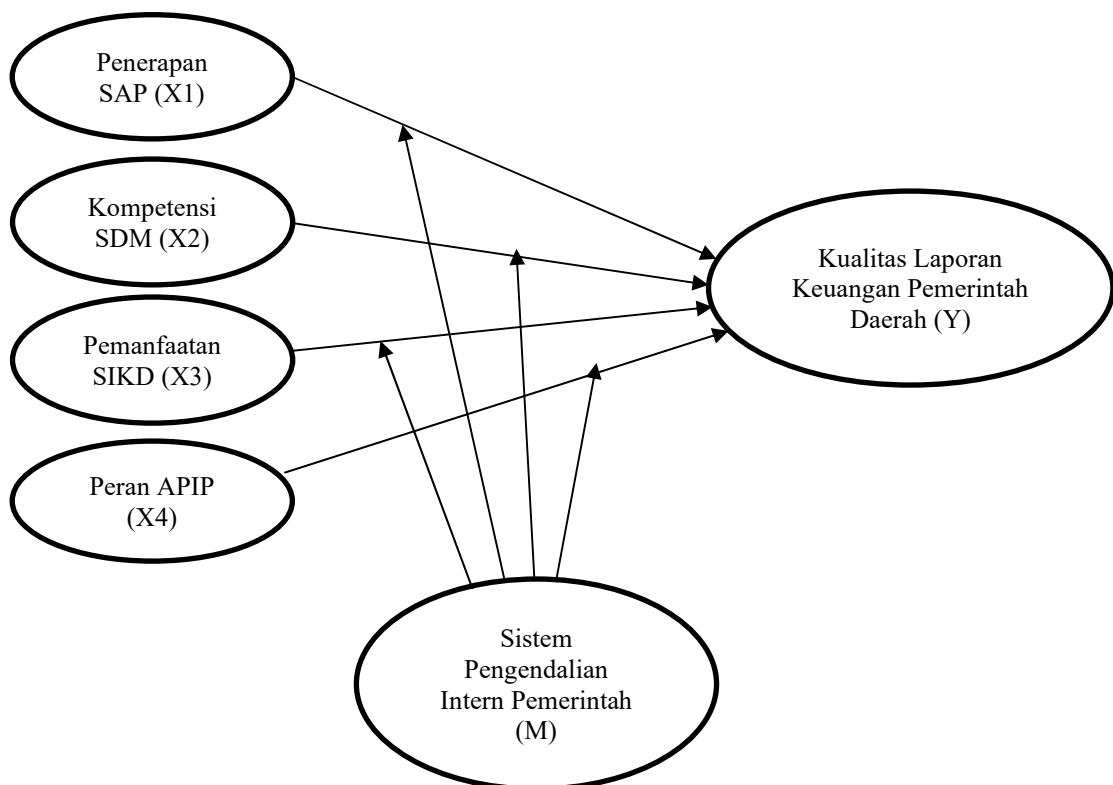
Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Melalui SPIP yang baik, maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. SPIP yang baik tentunya tidak akan berguna jika tidak didukung dengan penerapan SAP yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang baik serta peran APIP yang baik di dalam

penyelenggaraan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Dengan demikian memadainya penerapan SAP, adanya sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang baik, peran APIP yang baik serta diperkuat dengan SPIP yang memadai maka akan menghasilkan keluaran berupa informasi laporan keuangan berkualitas yang baik pula untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.

Ini dapat diartikan sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi hubungan antara kualitas informasi laporan keuangan dengan penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran APIP. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka diharapkan semakin baik kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Dewi (2017) dan Syarifudin (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sri Wineh, Tommy Ferdian dan Novianti (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Marangin dan Penelitian

Dewi (2017) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi hubungan standar akuntansi berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh audit internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan kemudian disusun konsep penelitian yang merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
2. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
4. Peran APIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
5. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi pengaruh Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
8. Sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang berdimensi hubungan kausal (*causal effect*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antarvariabel (Erlina, 2011). Hubungan kausal dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan kausal antara pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan, serta variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pendekatan kuantitatif ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran. Dalam pendekatan kuantitatif yang dipilih ini, peneliti ingin membuktikan pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan SIKD dan peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta kemudian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dapat dijadikan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh tersebut.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Feb 2022				Mar 2022				Apr 2022				Mei 2022				Jun 2022				Jul 2022				Agust 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■																					
3	Seminar Proposal							■																					
4	Pengumpulan Data								■	■	■	■	■	■	■														
5	Pengolahan Data												■	■	■	■													
6	Penulisan Laporan																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Seminar Hasil																												
8	Penyelesaian Laporan																												
9	Sidang Meja Hijau																												

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan kelompok orang, kejadian, atau peristiwa yang menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan wakil dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sampel jenuh (sensus), yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel sebanyak 35 OPD. Setiap OPD akan diberikan 3 (tiga) kuesioner yang akan diisi oleh Kepala Dinas OPD selaku pengguna anggaran/barang sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi OPD, kemudian kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan Bendahara Pengeluaran. Maka dari itu pada penelitian ini terdapat sebanyak 105 responden.

Tabel 3.2
Daftar OPD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner
1	Sekretariat Daerah Kabupaten	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Inspektorat	3
4	Dinas Pendidikan	3
5	Dinas Kesehatan	3
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
8	Dinas Pertanahan	3
9	Satuan Polisi Pamong Praja	3
10	Dinas Sosial	3
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	3
12	Dinas Tenaga Kerja	3
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
15	Dinas Ketahanan Pangan	3
16	Dinas Lingkungan Hidup	3
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
19	Dinas Perhubungan	3
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
25	Dinas Pariwisata	3
26	Dinas Pertanian	3
27	Dinas Perdagangan	3
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3
29	Badang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3
30	Badan Peelitian dan Pengembangan	3
31	Badan Kepegawaian Daerah	3
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
34	Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan	3
35	Rumah Sakit Umum DR Husni Thamrin Natal	3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab. Mandailing Natal

3.4. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan SIKD dan peran APIP.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan SAP yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan mengacu kepada PP no. 71 Tahun 2010. Adapun indikator dari variabel ini adalah basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Indikator variabel ini adalah pemahaman terhadap peraturan dan standar, interaksi dengan sistem, kontrol terhadap SDM, pendidikan dan *training*.

c. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah

Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

d. Peran APIP

Suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Internal audit membantu entitas dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin. Peran auditor internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Variabel Moderasi

Variabel moderasi yaitu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel moderasi yaitu sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses untuk memberikan arahan dan pengawasan serta memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan entitas. Indikator variabel ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang perubahan nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Di dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik suatu laporan keuangan dengan beberapa indikator yang mana diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala
Penerapan SAP (X1)	Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan mengacu kepada PP No. 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010).	1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah 2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya 3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik	Ordinal
Kompetensi SDM (X2)	Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada OPD (PP No. 11 Tahun 2017).	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Ordinal
Pemanfaatan SIKD (X3)	Meliputi suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi (PP No. 56 Tahun 2005).	1. Mempertinggi efektivitas 2. Menjawab kebutuhan informasi 3. Meningkatkan kinerja 4. Meningkatkan efisiensi	Ordinal

Peran APIP (X4)	Unsur penyelenggaraan daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah kota/kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa (PP No. 18 Tahun 2016).	1. pengawasan urusan pemerintahan 2. pengawasan administrasi pemerintahan	Ordinal
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (M)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).	1. Lingkungan pengendalian 2. penilaian risiko 3. kegiatan pengendalian 4. informasi dan komunikasi 5. pemantauan pengendalian intern	Ordinal
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)	Karakteristik suatu laporan keuangan dengan beberapa indikator yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (PP No 71 Tahun 2010).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Ordinal

Sumber : Berbagai Sumber

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Skala ordinal menurut Juliansyah Noor (2012:126) adalah Skala ordinal memberikan informasi tentang jumlah relative karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relative tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang tetapi bukan berupa banyak kekurangan dan kelebihannya. Skala ordinal bertujuan untuk memberikan informasi berupa nilai nilai pada jawaban.

Variabel-variabel tersebut dapat diukur oleh Instrument pengukuran dalam

bentuk kuisioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe *rating scale*.

Sugiyono (2017:93) mendefenisikan skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model *rating scale*, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja tetapi bisa juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena. Maka dapat dikatakan bahwa rating scale adalah alat pengumpulan data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rating scale karena dalam tingkatan pengukuran terdapat titik pengukuran, yaitu titik 1 sampai 5 yang artinya tingkat pengukuran setiap item pernyataan di kuisioner. Jawaban responden pada tiap item kuesioner mempunyai nilai dimana nilai 1 dikatakan nilai yang tidak baik dan nilai untuk titik 5 dikatakan nilai yang paling baik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dan harus diolah kembali, yaitu kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan yang akan dibahas dilakukan langsung dilakukan dengan dengan cara metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan.

Daftar pertanyaan (kuesioner) pada penelitian ini akan diisi oleh Kepala Dinas OPD selaku pengguna anggaran/barang sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi OPD, kemudian kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan Bendahara Pengeluaran.

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, berhubung jenis data yang digunakan merupakan kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala rating 5 poin. Skala rating adalah data mentah yang biasanya diperoleh oleh seorang peneliti dalam penelitian kualitatif. Sehingga skala yang menjadi model skala rating ini dibentuk melalui tanggapan responden menjawab wawancara yang dijukan. Skala dalam analisis rating scale pada hakekatnya mengacu pada teknik pengumpulan data dalam setiap kegiatan observasi yang mana dalam observasi tersebut berguna untuk menjelaskan, menggolonhkan, menilai individu atau situasi tertentu.

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen yaitu lima tingkatan, bergerak dari 1 sampai 5 alternatif jawaban, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pemberian Skor Jawaban Skala Rating

Alternatif Jawaban	Penilaian
Sangat Baik (SB)	5
Setuju (B)	4
Kurang Baik (KB)	3
Tidak Baik (TB)	2
Sangat Tidak Baik (STB)	1

Sumber : (Sugiyono, 2017)

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan pada pegawai pemerintah kabupaten Asahan sebanyak 30 orang.

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kemahiran suatu instrument pertanyaan sebagai alat ukur variabel penelitian (A Juliandi et al., 2015). Berikut rumus menguji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Juliandi et al., 2015)

Keterangan:

- n = banyaknya pasangan pengamatan
- $\sum x_i$ = jumlah pengamatan variabel X
- $\sum x_i^2$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel X
- $\sum y_i$ = jumlah pengamatan variabel Y
- $(\sum y_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel Y
- $\sum x_i y_i$ = jumlah hasil kali sampel X dan Y

Kriteria penarikan kesimpulan :

Menurut (A Juliandi et al., 2015) ketentuan apakah suatu butir instrumen valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya.

1. Suatu item instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasinya (r) $\geq r$ tabel atau nilai probabilitas $\text{sig} < = 0,05$.
2. Suatu item instrumen dapat dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi (r) $\leq r$ tabel atau nilai probabilitas $\text{sig} > = 0,05$

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0.369 > 0,306	0.030 < 0,05	Valid
	Y2	0.582 > 0,306	0.001 < 0,05	Valid
	Y3	0.577 > 0,306	0.001 < 0,05	Valid
	Y4	0.761 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid
	Y5	0.774 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid
	Y6	0.686 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid
	Y7	0.596 > 0,306	0.001 < 0.05	Valid
	Y8	0.441 > 0,306	0.015 < 0.05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X1)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Penerapan SAP (X1)	X1.1	0.438 > 0,306	0.016 < 0,05	Valid
	X1.2	0.505 > 0,306	0.004 < 0,05	Valid
	X1.3	0.492 > 0,306	0.006 < 0,05	Valid
	X1.4	0.656 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid
	X1.5	0.696 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid
	X1.6	0.660 > 0,306	0.000 < 0.05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM (X2)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Kompetensi SDM (X2)	X2.1	0.556 > 0,306	0.001 < 0,05	Valid
	X2.2	0.527 > 0,306	0.003 < 0,05	Valid
	X2.3	0.826 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X2.4	0.640 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X2.5	0.772 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X2.6	0.589 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.8
Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan SIKD (X3)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Pemanfaatan SIKD (X3)	X3.1	0.826 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.2	0.786 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.3	0.664 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.4	0.759 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.5	0.812 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.6	0.875 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.7	0.687 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X3.8	0.716 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas Variabel Peran APIP (X4)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Peran APIP (X4)	X4.1	0.774 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	X4.2	0.548 > 0,306	0.002 < 0,05	Valid
	X4.3	0.327 > 0,306	0.048 < 0,05	Valid
	X4.4	0.669 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.10
Hasil Uji Validitas Variabel SPIP (Z)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
SPIP (X3)	Z1	0.580 > 0,306	0.001 < 0,05	Valid
	Z2	0.574 > 0,306	0.001 < 0,05	Valid
	Z3	0.531 > 0,306	0.003 < 0,05	Valid
	Z4	0.495 > 0,306	0.005 < 0,05	Valid
	Z5	0.747 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	Z6	0.522 > 0,306	0.003 < 0,05	Valid
	Z7	0.479 > 0,306	0.007 < 0,05	Valid
	Z8	0.623 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid
	Z9	0.522 > 0,306	0.003 < 0,05	Valid
	Z10	0.684 > 0,306	0.000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS. 24.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Menurut (A Juliandi et al., 2015) tujuan pengujian reabilitas untuk menilai apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Uji reabilitas dilakukan setelah uji validitas atas pernyataan yang telah valid. Pengujian reabilitas dapat menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan rumus :

$$r = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma i^2} \right]$$

(A Juliandi et al., 2015)

Keterangan:

- r = reabilitas instrument (*cronbach alpha*)
- k = Banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma b^2$ = Jumlah Varians butir
- σi^2 = Varians Total

Tabel 3.11
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.758	0,60	Reliabel
Penerapan SAP (X1)	0.699		Reliabel
Kompetensi SDM (X2)	0.730		Reliabel
Pemanfaatan SIKD	0.898		Reliabel
Peran APIP	0.659		Reliabel
SPIP	0.780		Reliabel

Sumber : SPSS. 24.00

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua variabel $> 0,60$. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

3.6 Teknik Analisis Data

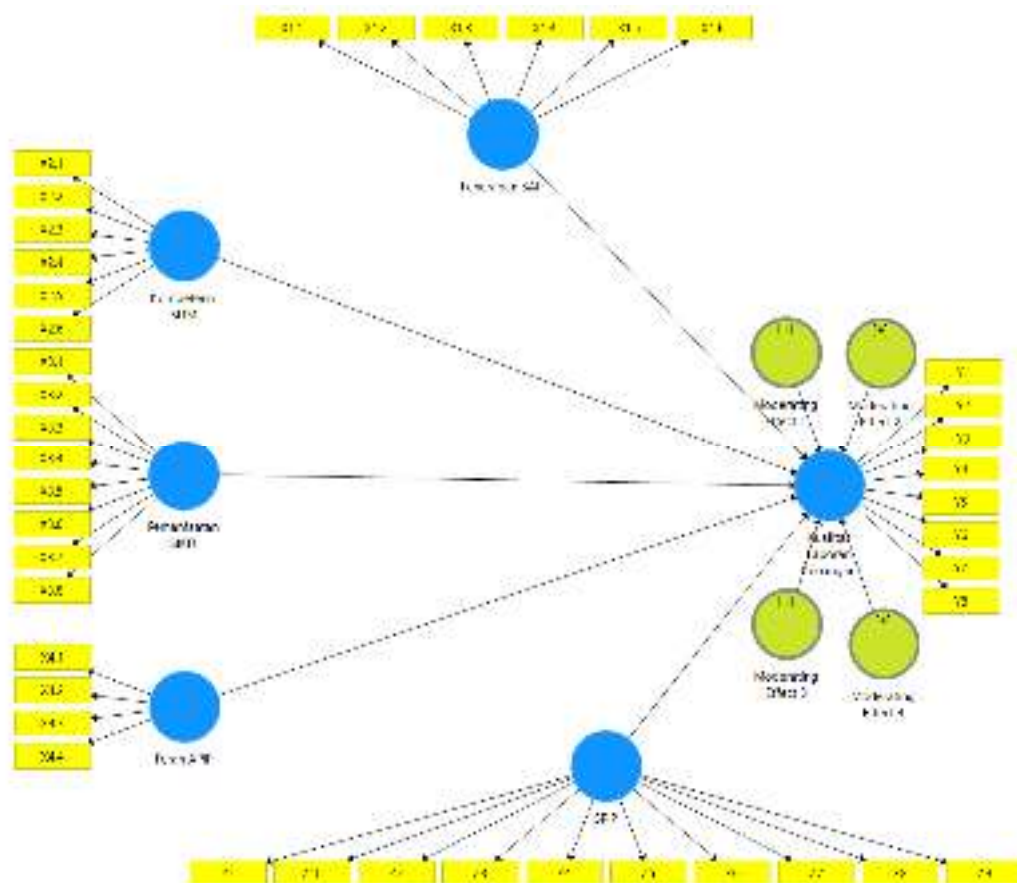
Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni partial least square – structural equation model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latari, 2015) Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan

prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Struktural PLS

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (outer model), yakni (a) validitas konvergen (convergent validity); (b) realibilitas dan validitas konstruk (construct reliability and validity); dan (c) validitas diskriminan (discriminant validity) serta analisis model struktural (inner model), yakni (a) koefisien determinasi (r-square); (b) f-square; dan (c) pengujian hipotesis (Hair et al., 2014). Estimasi parameter yang didapat dengan (Partial Least Square) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (loading). Kategori

ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (Partial Least Square) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan weight estimate.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

Dalam metode (Partial Least Square) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Kualitas Data

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghazali, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.
2. Discriminant Validity merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk.

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada 60 ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted* (AVE).

3. Composite reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan cronbach's alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.
4. Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (Partial Least Square) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan

interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (Partial Least Square) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$.

Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$.

a. Analisis Pengaruh Langsung X terhadap Y

1) Hipotesis

a) H_0 : X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

b) H_1 : X berpengaruh signifikan terhadap Y

2) Kriteria pengujian hipotesis

a) Tolak H_0 jika nilai sig $< \alpha 0,05$

- b) Terima H_0 jika nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$
- b. Analisis Tidak Pengaruh Langsung X terhadap Y dimoderasi Z
 - 1) Koefisien Pengaruh tidak langsung, tidak langsung, dan total :
 - a) Pengaruh langsung X ke Y dilihat dari nilai koefisien regresi X terhadap Y
 - b) Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z dilihat dari perkalian antara nilai koefisien regresi X terhadap Z dengan nilai koefisien regresi Z terhadap Y
 - c) Pengaruh total X ke Y dilihat dari nilai pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1), 6 pernyataan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia (X2), 8 pernyataan untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X3), 4 pernyataan untuk variabel peran APIP (X4), 10 pernyataan untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah (M) dan 8 pernyataan untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 35 Organisasi Perangkat Daerah dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal diwakili 3 orang perwakilan. Sebagai responden pada sampel penelitian dengan menggunakan skala item berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Tingkat Pengembalian Responden

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada 105 orang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal sebagai responden pada sampel penelitian dengan menggunakan skala item berbentuk tabel ceklis. Dari 105 angket yang disebar kepada responden tetapi tidak seluruhnya balik kepada peneliti, dimana jumlah angket yang balik kepada peneliti sebanyak 99 angket, akan tetapi dari 99 angket yang balik kepada peneliti tidak seluruhnya angket tersebut dapat

diolah karena ada beberapa ada beberapa angket yang tidak lengkap dalam pengisiannya. Dimana jumlah angket yang balik kepada peneliti yang dapat diolah adalah sebanyak 96 angket.

4.1.3 Deskripsi Data

4.1.3.1 Karakteristik Responden

Hasil tabulasi karakteristik 96 responden diolah menggunakan program SPSS yang menghasilkan deskripsi statistik responden dalam penelitian, seperti yang tampak pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Deskriptif Responden

Variabel	F	%
Usia		
25-35 Tahun	21	21.88
36-45 Tahun	33	34.38
46-55 Tahun	28	29.17
56-60 Tahun	14	14,58
Total	96	100
Jenis Kelamin		
Wanita	40	41.67
Laki-laki	56	58.33
Total	96	100
Tingkat Pendidikan Terakhir		
S1	75	78.12
S2	20	20,83
S3	1	1.05
Total	96	100

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat gambaran tentang jenis kelamin, jenjang pendidikan, usia. Jika dilihat dari jenis kelamin responden pria lebih banyak dari wanita yaitu laki-laki responden (58.33%). Dari tingkat jenjang pendidikan, mayoritas para responden tamatan S1, yaitu sebanyak 75 responden (78.12%). Dari sisi usia, sebagian besar responden memiliki usia 36-45 tahun yaitu sebanyak 33 responden (34.38%). Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah memiliki

jenjang pendidikan, usia dan yang cukup berpengalaman, sehingga pengisian kuesioner akan semakin berkualitas.

4.1.3.2 Karakteristik Jawaban Responden

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2018) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik
2,61 – 3,40	Kurang Baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini, variabel Kualitas laporan keuangan diukur dengan 4

indikator antara lain 1) Dapat dipahami, 2) Relevan, 3) Keandalan, dan 4) Dapat Dibandingkan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Kualitas laporan keuangan yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan						Rata - rata	Katagori
		SB	B	KB	TB	STB	Total		
		F	F	F	F	F			
Dapat Dipahami								3.90	Baik
1	Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi	29	41	15	7	4	96	3.88	Baik
	Persentase	30.2	42.7	15.6	7.3	4.2	100		
2	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu	31	43	11	5	6	96	3.92	Baik
	Persentase	32.3	44.8	11.5	5.2	6.3	100		
Relevan								3.99	Baik
3	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	27	49	10	6	4	93	4.05	Baik
	Persentase	28.1	51.0	10.4	6.3	4.2	100		
4	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan	34	37	12	9	4	96	3.92	Baik
	Persentase	35.4	38.5	12.5	9.4	4.2	100		
Keandalan								3.84	Baik
5	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi keuangan lainnya yang seharusnya disajikan	25	46	14	10	1	96	3.88	Baik
	Persentase	26.0	47.9	14.6	10.4	1.0	100		
6	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	27	42	13	10	4	96	3.81	Baik
	Persentase	28.1	43.8	13.5	10.4	4.2	100		
Dapat Dibandingkan								4.03	Baik
7	Laporan yang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami	37	37	13	8	1	96	4.05	Baik
	Persentase	38.5	38.5	13.5	8.3	1.0	100		
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam	28	50	10	6	2	96	4.00	Baik

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.									
Persentase	29.2	52.1	10.4	6.3	2.1	100			
Rata-rata	30	43	12	8	3	96	3.94	Baik	

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 3.94 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1
Persentasi Jawaban Responden Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal dapat menyusun laporan keuangan secara sistematis sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)

Dalam penelitian ini, variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah diukur dengan 3 indikator antara lain 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan

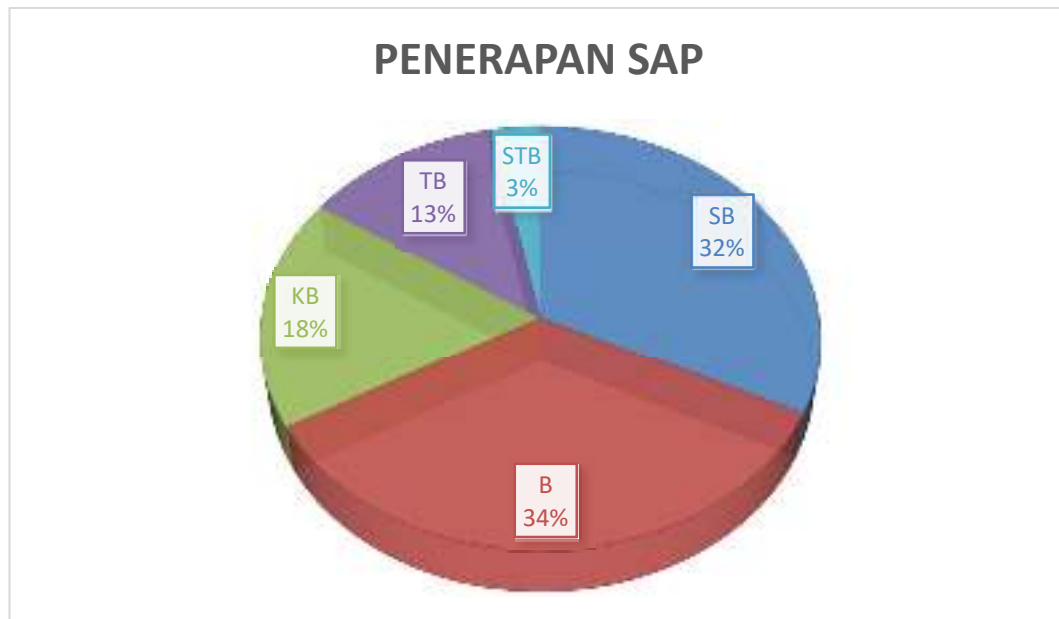
standar akuntansi pemerintah, 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya dan 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Kualitas laporan keuangan yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Total	Rata-rata	Kategori
		SB	B	KB	TB	STB			
		F	F	F	F	F			
Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah							4.03	Baik	
1	Sistem Akuntansi Keuangan Pada OPD ini Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	37	37	13	8	1	96	4.05	Baik
	Persentase	38.54	38.54	13.54	8.33	1.04	100		
2	Sistem Akuntansi Keuangan Pada OPD ini tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan	26	54	8	6	2	96	4.00	Baik
	Persentase	27.08	56.25	8.33	6.25	2.08	100		
Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya							3.77	Baik	
3	Setiap transaksi keuangan pada OPD ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi	35	25	20	15	1	96	3.81	Baik
	Persentase	36.46	26.04	20.83	15.63	1.04	100		
4	Setiap transaksi keuangan pada OPD ini didukung oleh bukti transaksi	30	33	14	14	5	96	3.72	Baik
	Persentase	31.25	34.38	14.58	14.58	5.21	100		
Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic							3.63	Baik	
5	Pada OPD ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya	31	25	20	15	5	96	3.65	Baik
	Persentase	32.29	26.04	20.83	15.63	5.21	100		
6	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi	26	27	25	15	4	96	3.61	Baik
	Persentase	27.08	28.13	26.04	15.63	4.17	100		
Rata-rata		31	33	17	12	3	96	3.81	Baik

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, penerapan sistem akuntansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 3.81 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2
Persentasi Jawaban Responden Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Dalam penelitian ini, variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah diukur dengan 3 indikator antara lain 1) pengetahuan, 2) keterampilan dan 3) sikap. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Kualitas laporan keuangan yang

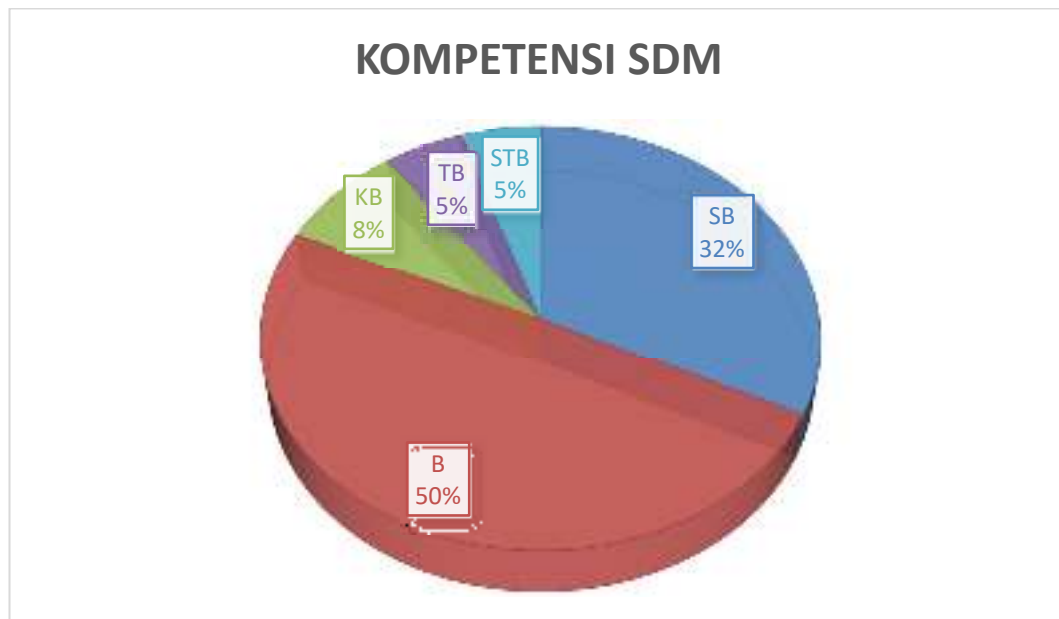
dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Total	Rata-rata	Kategori
		SB	B	KB	TB	STB			
		F	F	F	F	F			
Pengetahuan								4.32	Baik
1	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) OPD memahami tugas pokok fungsi sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan baik	33	63	0	0	0	96	4.34	Baik
	Persentase	0	0	0	0	0	100		
2	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) mengetahui dan memahami peraturan-peraturan keuangan yang terkait dengan laporan keuangan	31	63	2	0	0	96	4.30	Baik
	Persentase	32.3	65.6	2.1	0	0	100		
Keterampilan								3.97	Baik
3	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada	33	44	8	7	4	96	3.99	Baik
	Persentase	34.4	45.8	8.3	7.3	4.2	100		
4	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010	35	36	14	7	4	96	3.95	Baik
	Persentase	36.5	37.5	14.6	7.3	4.2	100		
Sikap								3.97	Baik
5	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan	28	50	11	7	0	96	4.03	Baik
	Persentase	29.2	52.1	11.5	7.3	0	100		
6	Pengelola Keuangan (PA dan PPK) selalu berkejaberdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan	31	40	14	8	3	96	3.92	Baik
	Persentase	32.3	41.7	14.6	8.3	3.1	100		
Rata-rata		32	49	8	5	2	96	4.09	Baik

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata-rata skor jawaban responden bernilai rata rata 4.09 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.3
Persentasi Jawaban Responden Kompetensi SDM

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Pengelola Keuangan (PA dan PPK) pada pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal telah memahami tugas pokok fungsi sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan baik dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. **Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3)**

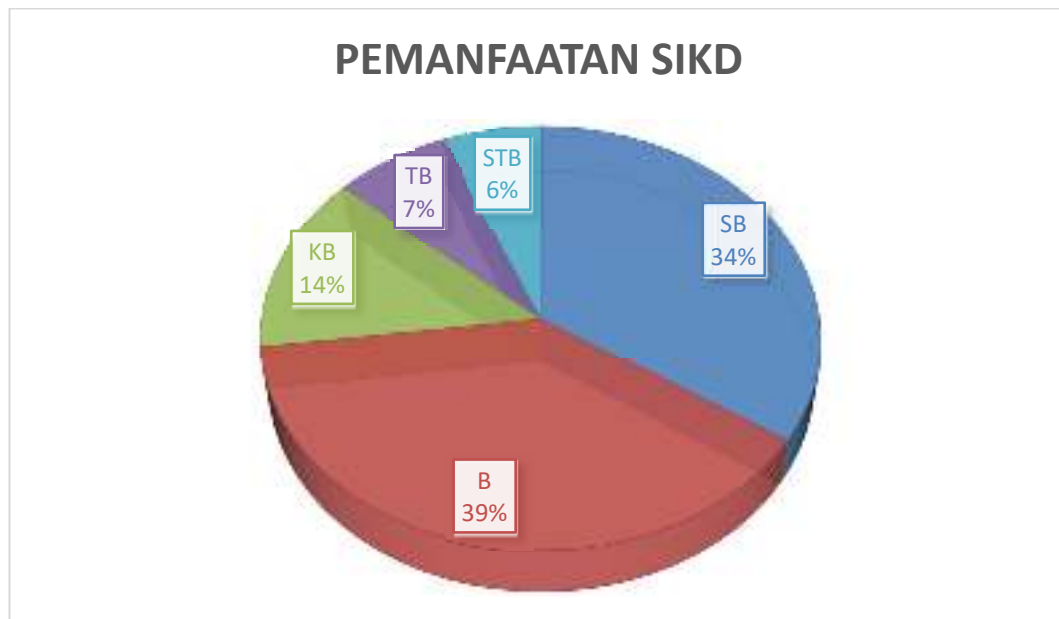
Dalam penelitian ini, variabel pemanfaatan sistem infrmasi keuangan daerah diukur dengan 4 indikator antara lain 1) Mempertinggi efektivitas, 2) Menjawab kebutuhan informasi, 3) Meningkatkan kinerja dan 4) meningkatkan efisiensi. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel pemanfaatan sistem infrmasi keuangan daerah yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemanfaatan
Sistem Informasi Keuangan Daerah

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Total	Rata-rata	Katagori
		SB	B	KB	TB	STB			
		F	F	F	F	F			
Mempertinggi efektivitas								3.86	Baik
1	Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keefektifan proses yang dilakukan pengguna	29	44	10	7	6	96	3.86	Baik
	Persentase	30.21	45.83	10.42	7.29	6.25	100		
2	Penggunaan teknologi mempermudah pekerjaan	29	42	13	7	5	96	3.86	Baik
	Persentase	30.21	43.75	13.54	7.29	5.21	100		
Menjawab kebutuhan informasi								3.79	Baik
3	Penggunaan teknologi mampu memberikan informasi laporan sesuai dengan yang diharapkan	29	39	15	2	11	96	3.76	Baik
	Persentase	30.21	40.63	15.63	2.08	11.46	100		
4	Penggunaan teknologi mampu memberikan informasi laporan yang cukup	26	47	8	9	6	96	3.81	Baik
	Persentase	27.08	48.96	8.33	9.38	6.25	100		
Meningkatkan kinerja								3.77	
5	Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna	24	34	20	12	6	96	3.76	Baik
	Persentase	25.00	35.42	20.83	12.50	6.25	100		
6	Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja	29	38	15	7	7	96	3.78	Baik
	Persentase	30.21	39.58	15.63	7.29	7.29	100		
Meningkatkan efisiensi								4.07	Baik
7	Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna	49	22	13	6	6	96	4.06	Baik
	Persentase	51.04	22.92	13.54	6.25	6.25	100		
8	Penggunaan teknologi mempercepat pekerjaan	46	27	11	9	3	96	4.08	Baik
	Persentase	47.92	28.13	11.46	9.38	3.13	100		
Rata-rata		33	37	13	7	6	96	3.78	Baik

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata-rata skor jawaban responden bernilai rata rata 3.78 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.4
Persentasi Jawaban Responden Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam pemanfaatn sistem informasi keuangan daerah dapat mempercepat pekerjaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal

5. Peran APIP (X4)

Dalam penelitian ini, variabel peran APIP diukur dengan 2 indikator antara lain 1) pengawasan urusan pemerintahan, dan 2) pengawasan administrasi pemerintahan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel pemanfaatan sistem infrmasi keuangan daerah yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Peran APIP

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Total	Rata-rata	Katagori
		SB	B	KB	TB	STB			
		F	F	F	F	F			
pengawasan urusan pemerintahan							3.76	Baik	
1	Inspektorat mereviu apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif	17	50	15	9	5	96	3.68	Baik
	Persentase	17.71	52.08	15.63	9.38	5.21	100		
2	Inspektorat menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintah daerah	29	43	11	5	8	96	3.83	Baik
	Persentase	30.21	44.79	11.46	5.21	8.33	100		
pengawasan administrasi pemerintahan							3.89	Baik	
3	Inspektorat mereviu sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaporannya	28	39	18	7	4	96	3.83	Baik
	Persentase	29.17	40.63	18.75	7.29	4.17	100		
4	Inspektorat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah dan merekomendasikan solusi yang sesuaiatas permasalahan yang timbul	32	44	9	5	6	96	3.95	Baik
	Persentase	33.33	45.83	9.38	5.21	6.25	100		
	Rata-rata	27	44	13	7	6	96	3.82	Baik

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, peran auditor pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata-rata skor jawaban responden bernilai rata rata 3.82 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.5
Persentasi Jawaban Responden Peran APIP

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam auditor pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah dan merekomendasikan solusi yang sesuaiatas permasalahan yang timbul.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)

Dalam penelitian ini, variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan 5 indikator antara lain 1) Lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) .kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi dan 5) pemantauan pengendalian intern. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Sangat Tidak Baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Kurang Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel pemanfaatan sistem infrmasi keuangan daerah yang dirangkum pada tabel berikut:

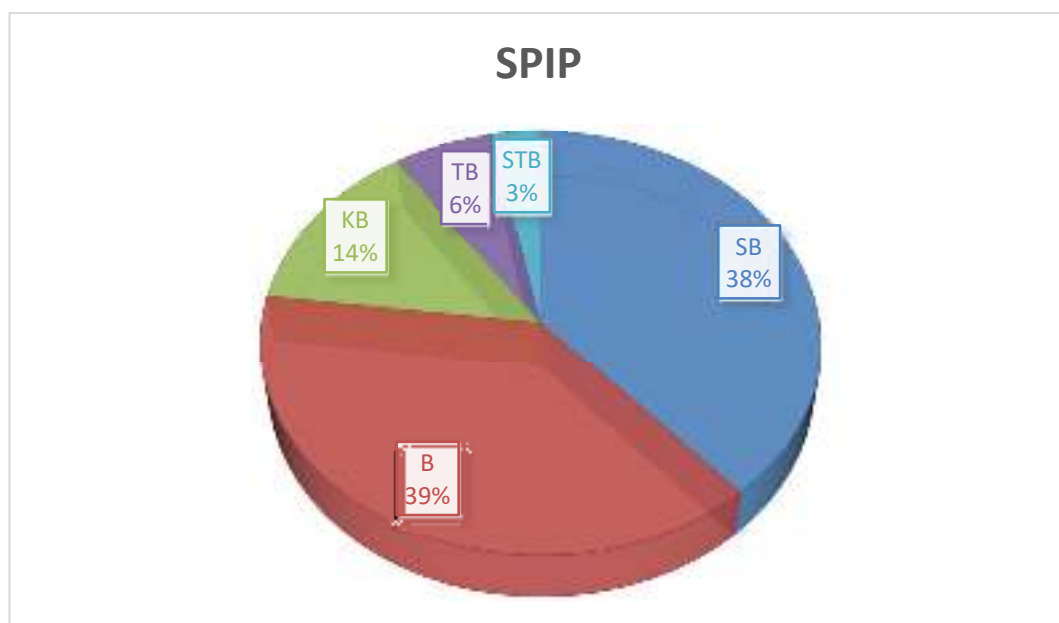
Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

No	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Total	Rata-rata	Katagori
		SB	B	KB	TB	STB			
		F	F	F	F	F			
Lingkungan pengendalian							4.23	Baik	
1	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	51	26	13	5	1	96	4.26	Baik
	Persentase	53.13	27.08	13.54	5.21	1.04	100		
2	BKD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD	47	31	10	6	2	96	4.20	Baik
	Persentase	48.96	32.29	10.42	6.25	2.08	100		
penilaian risiko							4.07	Baik	
3	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi	36	41	13	4	2	96	4.09	Baik
	Persentase	37.50	42.71	13.54	4.17	2.08	100		
4	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi	33	46	9	5	3	96	4.05	Baik
	Persentase	34.38	47.92	9.38	5.21	3.13	100		
kegiatan pengendalian							3.83	Baik	
5	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada BKD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas	31	40	15	7	3	96	3.93	Baik
	Persentase	32.29	41.67	15.63	7.29	3.13	100		
6	Opd Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisas	24	43	17	6	3	96	3.73	Baik
	Persentase	25.00	44.79	17.71	6.25	3.13	100		
informasi dan komunikasi							4.03	Baik	
7	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	30	51	9	2	4	96	4.05	Baik
	Persentase	31.25	53.13	9.38	2.08	4.17	100		
8	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing BKD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	33	41	15	3	4	96	4.00	Baik
	Persentase	34.38	42.71	15.63	3.13	4.17	100		

Pemantauan								3.87	Baik
9	BKD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern	37	27	16	12	4	96	3.84	Baik
	Persentase	38.54	28.13	16.67	12.50	4.17	100		
10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan	40	25	17	9	5	96	3.90	Baik
	Persentase	41.67	26.04	17.71	9.38	5.21	100		
Rata-rata		37	37	13	6	3	96	4.01	Baik

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, sistem pengendalian item pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mandailing Natal berdasarkan rata-rata skor jawaban responden bernilai rata rata 4.01 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.6
Persentasi Jawaban Responden Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian

intern pemerintah dimana pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.

4.1.4 Analisis Outer Model

4.1.4.1 *Validity Item*

Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besaran *variance* yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan dengan varian yang disebabkan oleh *error* pengukuran. Standarnya adalah bila nilai AVE diatas 0,5 maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki *convergent validity* yang baik. Artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

Tabel 4.9
Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel Laten	Average Variance Extracted (AVE)
Penerapan SAP	0.548
Kompetensi SDM	0.721
Pemanfaatan SIKD	0.719
Peran APIP	0.700
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.692
Kualitas Laporan Keuangan	0.522

(Sumber : Data Diolah, 2022)

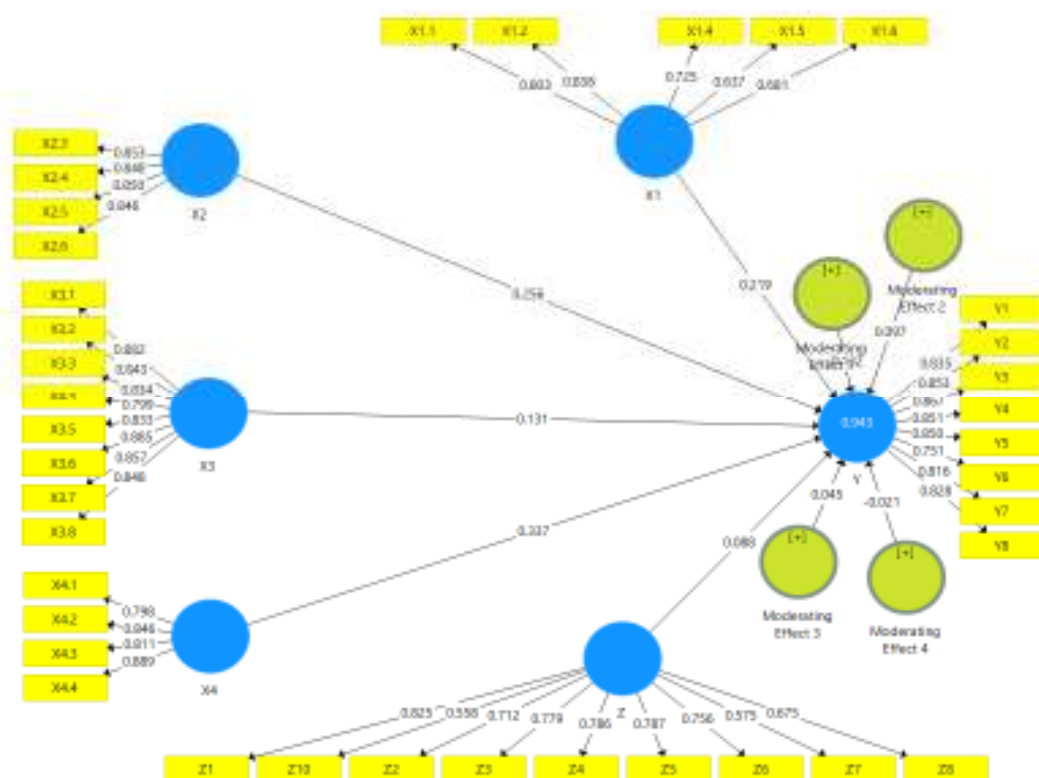
Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai AVE untuk penerapan SAP sebesar 0,548; kompetensi sebesar 0,721; pemanfaatan SIKD 0,719; Peranan APIP sebesar 0.700; sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0.692 dan untuk kualitas laporan keuangan sebesar 0,522. Keenam variabel memiliki AVE yang berada diatas 0,5 sehingga konstruk memiliki *convergent validity* yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari

setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

4.1.4.2 Discriminant Validity

Pemeriksaan *discriminant validity* dari model pengukuran reflektif yang dinilai berdasarkan *cross loading* dan membandingkan antara nilai AVE dengan kuadrat korelasi antarkonstrak. Ukuran *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstraknya dan konstrak dari blok lain.

Berikut adalah nilai *validity item* yang dapat dilihat pada kolom *standardized loading*:



Gambar 4.7
Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model

Berdasarkan gambar 4.7 di atas dapat dilihat bahwa seluruh loading bernilai lebih dari 0,5 sehingga tidak perlu disisihkan. Dengan demikian, tiap indikator telah valid untuk menjelaskan masing-masing laten variabelnya yaitu penerapan SAP, kompetensi; pemanfaatan SIKD, Peranan APiP; sistem pengendalian intern

pemerintah dan untuk kualitas laporan keuangan.

Discriminant validity yang baik akan mampu menjelaskan variabel indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan menjelaskan varian dari indikator kontrak yang lain. Berikut adalah nilai *discriminant validity* untuk masing-masing indikator.

Tabel 4.10
Discriminant Validity

Indikator	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1.1	0.803	0.723	0.698	0.700	0.796	0.698
X1.2	0.838	0.778	0.666	0.751	0.821	0.699
X1.3	0.725	0.527	0.425	0.497	0.528	0.474
X1.4	0.637	0.352	0.356	0.403	0.426	0.377
X1.5	0.681	0.503	0.510	0.566	0.566	0.503
X1.6	0.622	0.853	0.628	0.680	0.710	0.725
X2.3	0.718	0.848	0.609	0.717	0.783	0.789
X2.4	0.686	0.850	0.604	0.662	0.721	0.750
X2.5	0.733	0.846	0.706	0.733	0.794	0.729
X2.6	0.658	0.649	0.882	0.748	0.763	0.748
X3.1	0.594	0.627	0.843	0.677	0.693	0.665
X3.2	0.665	0.683	0.834	0.710	0.763	0.673
X3.3	0.578	0.535	0.799	0.686	0.676	0.556
X3.4	0.642	0.655	0.833	0.725	0.698	0.633
X3.5	0.695	0.648	0.885	0.773	0.771	0.681
X3.6	0.611	0.668	0.857	0.723	0.725	0.767
X3.7	0.615	0.630	0.848	0.673	0.716	0.709
X3.8	0.584	0.576	0.634	0.798	0.675	0.608
X4.1	0.630	0.674	0.694	0.846	0.767	0.675
X4.2	0.584	0.720	0.711	0.811	0.814	0.732
X4.3	0.630	0.767	0.771	0.889	0.861	0.793
X4.4	0.723	0.758	0.723	0.808	0.835	0.28
Y1	0.676	0.741	0.746	0.864	0.853	0.783
Y2	0.749	0.744	0.753	0.835	0.867	0.750
Y3	0.742	0.780	0.708	0.754	0.851	0.779
Y4	0.722	0.800	0.766	0.763	0.850	0.743
Y5	0.709	0.600	0.701	0.733	0.751	0.629
Y6	0.723	0.716	0.674	0.692	0.816	0.695
Y7	0.648	0.759	0.631	0.739	0.828	0.706
Y8	0.780	0.668	0.732	0.705	0.719	0.825
Z1	0.800	0.462	0.425	0.428	0.422	0.558
Z2	0.564	0.695	0.619	0.562	0.646	0.712
Z3	0.467	0.707	0.557	0.646	0.711	0.779
Z4	0.516	0.707	0.614	0.654	0.690	0.786

Z5	0.674	0.723	0.553	0.628	0.657	0.787
Z6	0.659	0.654	0.602	0.682	0.687	0.756
Z7	0.527	0.510	0.497	0.618	0.561	0.575
Z8	0.598	0.674	0.694	0.846	0.767	0.675
Z9	0.530	0.510	0.497	0.618	0.519	0.675
Z10	0.449	0.510	0.497	0.618	0.519	0.793

(Sumber : Data Diolah, 2022)

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing

4.1.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Rule of thumb* yang digunakan untuk nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,6 serta nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah > 0,60 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil uji reabilitas kedua metode dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel / Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil Uji
Penerapan SAP	0.796	0.857	Reliabel
Kompetensi SDM	0.871	0.912	Reliabel
Pemanfaatan SIKD	0.944	0.953	Reliabel
Peran APIP	0.857	0.903	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.936	0.947	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0.883	0.906	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk penerapan SAP sebesar 0,796; kompetensi sebesar 0,871; pemanfaatan SIKD 0,944; Peranan APIP sebesar 0.857; sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0.936 dan untuk kualitas laporan keuangan sebesar 0,883. Keenam laten memperoleh nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan seluruh faktor memiliki reabilitas atau keterandalan yang baik sebagai alat ukur.

4.1.5 Analisis Inner Model

R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen) ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Hasil *r-square* untuk variabel laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai *R-Square* yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji R-Square

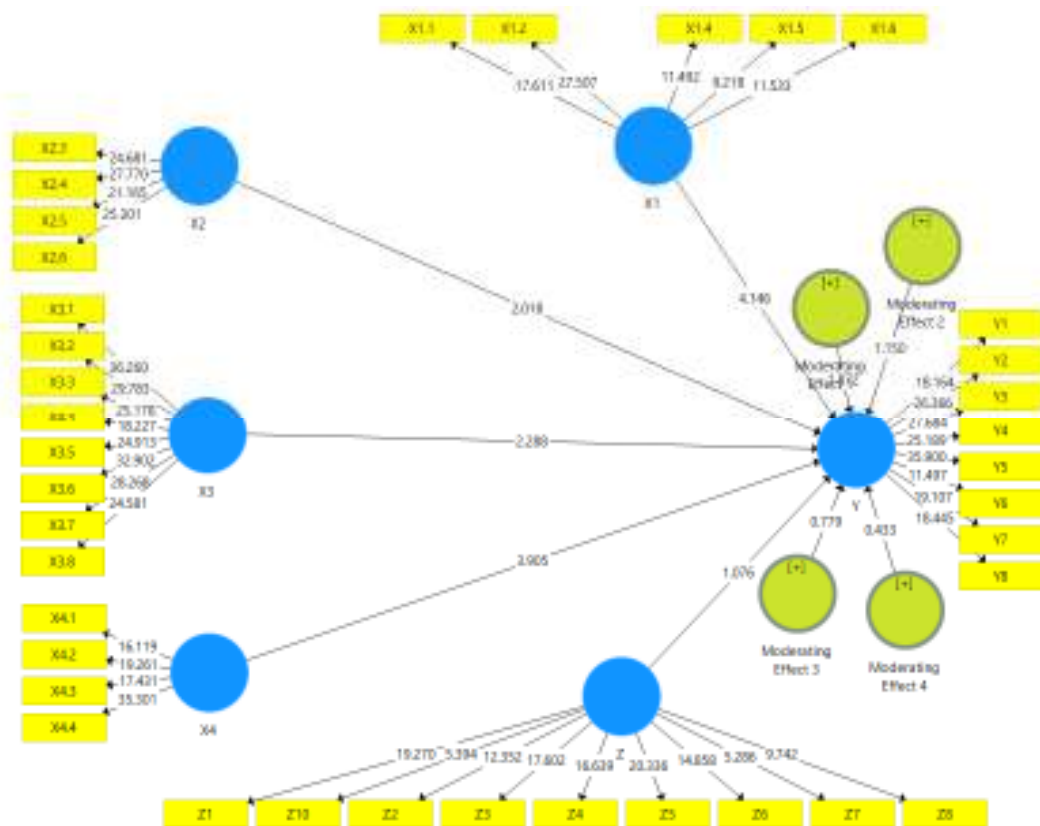
	R Square	R Square Adjusted
Y	0.943	0.937

Sumber : PLS 3.00

Dari tabel 4.12 di atas diketahui bahwa pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y dengan nilai r-square 0,943 mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X1, X2, X3 dan X4 sebesar 94,3% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan 5.7% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, gambar hasil uji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada gambar *path coefficient* berikut ini :



Gambar 4.8 Path Coefficient

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Langsung

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel *path coefficient* berikut ini :

Tabel 4.13 Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
X1 -> Y	0.219	0.225	0.053	4.146	0.000
X2 -> Y	0.256	0.262	0.127	2.018	0.044
X3 -> Y	0.131	0.125	0.057	2.288	0.023
X4 -> Y	0.337	0.319	0.086	3.905	0.000

Sumber : PLS 3.00

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,219. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,256. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,044 < 0,05$, berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,131. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,023 < 0,05$, berarti pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

4. Pengaruh peran auditor daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,337. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik peran auditor, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti peran auditor daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Adapun pengaruh tidak langsung diantara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	-0.132	0.144	0.067	1.950	0.052
Moderating Effect 2 -> Y	0.097	0.112	0.077	1.261	0.208
Moderating Effect 3 -> Y	0.045	0.041	0.061	0.733	0.464
Moderating Effect 4 -> Y	-0.021	-0.020	0.059	0.357	0.721

Sumber : PLS 3.00

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar -0,132. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas

(p-values) sebesar $0,052 > 0,05$, berarti dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah koefisien jalur sebesar $0,097$. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,208 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar $0,045$. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,464 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
4. Pengaruh peran auditor daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar $-0,021$. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,721 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh peran auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

4.2 Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada sepuluh bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,219.. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka semakin baik kualitas keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, dimana dengan semakin baiknya penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah maka akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini penerapan sistem akuntansi pemerintah diukur dengan tiga indikator yaitu kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar

pencatatan akuntansi pada umumnya, dan pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Berdasarkan hasil auter loading masing-masing indikator diketahui bahwa auter loading indikator pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.637 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah sebesar 0.838 dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan pada OPD ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia 25-35 tahun sebanyak 21 responden (21.88%), usia 36-45 tahun sebanyak 33 responden (34.38%), usia 46-55 tahun sebanyak 28 responden (29.17%) dan usia 56-60 tahun sebanyak 14 responden (14.58%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal berusia 36-45 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden wanita sebanyak 40 responden (41.67%) dan laki-laki sebanyak 56 responden (58.33%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal adalah laki-laki. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 75 responden (78.12%), pendidikan S2 20 responden (20.83%) dan Pendidikan S3 1 responden (1,05%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal memiliki

pendidikan yang cukup yaitu S1. Sehingga penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal yang menyebabkan seringnya terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan pemerintah kabupaten Mandailing Natal agar melaksanakan pelatihan penggunaan sistem akuntansi pemerintah sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

SAP merupakan pedoman dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Republik Indonesia, 2010). Hal ini berarti semakin baik penerapan SAP didalam suatu laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heri Susanto, Eka Nurmalia Sari, dan Maya Sari (2021), Sri Wineh, Tommy Ferdian & Novianti (2019), Azlim, Darwanis & Bakar (2012), Wati, Kadek Desiana (2014), Suwanda (2015) dan Saragih (2016) yang menyebutkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian Aruan (2019) menyebutkan bahwa penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desmaria Puji Kesuma, Anwar, & Darmansyah (2017) dan Sianturi (2016) menyebutkan bahwa penerapan

SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,256. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,044 < 0,05$, berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, dimana dengan semakin baiknya kompetensi sumber daya manusia Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal maka akan lebih mudah untuk Menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini kompetensi diukur dengan tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan hasil outer loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading indikator sikap menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.846 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator keterampilan sebesar 0.853. dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator sikap diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan mengenai pengelola Keuangan

(PA dan PPK) selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia 25-35 tahun sebanyak 21 responden (21.88%), usia 36-45 tahun sebanyak 33 responden (34.38%), usia 46-55 tahun sebanyak 28 responden (29.17%) dan usia 56-60 tahun sebanyak 14 responden (14.58%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal berusia 36-45 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden wanita sebanyak 40 responden (41.67%) dan laki-laki sebanyak 56 responden (58.33%). Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 75 responden (78.12%), pendidikan S2 20 responden (20.83%) dan Pendidikan S3 1 responden (1,05%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Sehingga kurangnya wawasan dalam menyusun laporan keuangan dimana SDM hanya menoton berdasarkan praktek yang dapat diterima secara umum sehingga laporan keuangan yang disusun kurang maksimal yang menyebabkan seringkali terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar melaksanakan pelatihan dan diklat serta studi banding ke beberapa daerah yang ada diluar kabupaten mandailing natal sehingga dapat menambah wawasan sumber daya manusia.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki

seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan (Pujanira & Taman, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heri Susanto, Eka Nurmala Sari & Maya Sari (2021), Aruan (2019), Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Siahaya, Asnawi & Layuk (2011), Rahmatika & Alfiah (2014) dan Ayu, Kiranayanti, Made & Erawati (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan penelitian Pujanira & Taman (2017), Wati et al., (2014) menyimpulkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak demikian dengan Syarifudin (2014) yang menyatakan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian Sukmaningrum (2012) menyatakan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,131. Pengaruh tersebut mempunyai

nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,023 < 0,05$, berarti pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, dimana dengan semakin baiknya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal maka akan lebih mudah untuk Menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini kompetensi diukur dengan empat indikator yaitu Mempertinggi efektivitas, Menjawab kebutuhan informasi, Meningkatkan kinerja dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan hasil auter loading masing-masing indikator diketahui bahwa auter loading indikator menjawab kebutuhan informasi menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.799 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator meningkatkan kinerja sebesar 0.885. dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator menjawab kebutuhan informasi diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan mengenai Penggunaan teknologi mampu memberikan informasi laporan yang cukup. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia 25-35 tahun sebanyak 21 responden (21.88%), usia 36-45 tahun sebanyak 33 responden (34.38%), usia 46-55 tahun sebanyak 28 responden (29.17%) dan usia 56-60 tahun sebanyak 14 responden (14.58%). Hal ini berarti

sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal berusia 36-45 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden wanita sebanyak 40 responden (41.67%) dan laki-laki sebanyak 56 responden (58.33%). Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 75 responden (78.12%), pendidikan S2 20 responden (20.83%) dan Pendidikan S3 1 responden (1,05%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Sehingga penggunaan teknologi informasi dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal yang menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang cukup. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan pemerintah kabupaten Mandailing Natal agar melaksanakan pelatihan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Sonny Loho & Sugiyanto, 2004). Dengan kata lain, hasil dari

paham sistem informasi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut teori kegunaan keputusan hubungan antara pemanfaatan SIKD terhadap kualitas laporan keuangan digambarkan melalui adanya pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengamatkan adanya dukungan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana teori kegunaan keputusan mencakup syarat dari kualitas informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Yuliani & Bakar (2010), Siahaya et al. (2011) dan Wati, Kadek Desiana (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda et al. (2018) dan Aruan (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda halnya dengan penelitian Diani (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.4 Pengaruh Peran APIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh peran auditor daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,337. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar

$0,000 < 0,05$, berarti peran auditor daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal

Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin baik peran auditor, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, dimana dengan semakin peran auditor dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal maka akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini kompetensi diukur dengan dua indikator yaitu pengawasan urusan pemerintahan, dan pengawasan administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil auter loading masing-masing indikator diketahui bahwa auter loading indikator pengawasan urusan pemerintah menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.798 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator pengawasan adminitrasi pemerintah sebesar 0.889. dari hasil penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator menjawab pengawasan urusan pemerintah diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan mengenai inspektorat mereviu apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efesien dan efektif. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia 25-35 tahun sebanyak 21 responden (21.88%), usia 36-45 tahun sebanyak 33 responden (34.38%), usia 46-55 tahun sebanyak 28 responden (29.17%) dan usia 56-60 tahun sebanyak 14 responden (14.58%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal berusia 36-45 tahun. Dari hasil deskripsi

responden ditemukan jumlah responden wanita sebanyak 40 responden (41.67%) dan laki-laki sebanyak 56 responden (58.33%). Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 75 responden (78.12%), pendidikan S2 20 responden (20.83%) dan Pendidikan S3 1 responden (1.05%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Mandailing Natal memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Sehingga inspektorat sering menemukan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini inspektorat kabupaten Mandailing Natal sebagai APIP sebaiknya melakukan pembinaan ke seluruh OPD tanpa terkecuali, sehingga setiap OPD memperoleh pembinaan yang dapat meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir kemungkinan munculnya temuan permasalahan pada saat BPK melakukan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi sebaiknya dipantau proses tindak lanjutnya di OPD sehingga permasalahan yang ada benar-benar tuntas dapat diselesaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota/kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD,

inspektorat melakukan reviu terhadap laporan keuangannya.

Pada teori kegunaan keputusan mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Dalam hal ini auditor internal berperan untuk menentukan salah satu komponen yaitu keandalan yang dihasilkan dari informasi akuntansi agar berkualitas.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, dan Muhyarsyah (2020) dan Aruan (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambingon, Yadiati & Kewo (2018), Yuliani & Bakar (2010), Diani (2014) dan Saragih (2016) yang menunjukkan peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian Adha Inapty & Martiningsih (2016) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

4.2.5 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar -0,132.

Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,052 > 0,05$, berarti dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, serta tidak didukung dengan sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal masih optimal. Hal ini dimungkinkan karena indikator pengukuran variabel sistem pengendalian intern pemerintah sudah tercakup dalam indikator pengukuran variabel sistem akuntansi pemerintah.

Nilai outer loading penerapan sistem akuntansi pemerintah tertinggi terdapat pada indikator prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya dengan nilai 0.838 dengan deskripsi jawaban responden sistem Akuntansi Keuangan Pada OPD ini tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 83.33% responden menjawab pernyataan baik.

Nilai outer loading sistem pengendalian intern pemerintah tertinggi terdapat pada indikator pemantauan dengan nilai 0.558 dengan deskripsi jawaban responden yang menyatakan bahwa pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan dengan 33.40% responden menjawab kurang baik.

Merujuk pada outer loading tertinggi tersebut, menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah yang telah efektif dalam menghasilkan data

yang akurat tetapi tidak didukung oleh pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan demikian akan lebih mempersulit dalam penyusunan laporan keuangan.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP adalah suatu rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Adha Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, baik dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporannya. Artinya pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal ditentukan dari bagaimana kualitas penerapan SAP pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri.

4.2.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan mempunyai dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah koefisien jalur sebesar 0,097. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,208 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia, tetapi tidak didukung dengan sistem pengendalian intern pemerintah maka Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal masih optimal. Hal ini dimungkinkan karena indikator pengukuran variabel pada sistem pengendalian intern pemerintah sudah mencakup dalam indikator pengukuran variabel kompetensi sumber daya manusia.

Nilai outer loading kompetensi sumber daya manusia tertinggi terdapat pada indikator keterampilan dengan nilai 0.853 dengan deskripsi jawaban responden Pengelola Keuangan (PA dan PPK) memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada dengan 80.2% responden menjawab pernyataan baik.

Nilai outer loading sistem pengendalian intern pemerintah tertinggi terdapat

pada indikator pemantauan dengan nilai 0.558 dengan deskripsi jawaban responden yang menyatakan bahwa pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan dengan 33.40% responden menjawab kurang baik.

Merujuk pada outer loading tertinggi tersebut, menunjukkan bahwa sumberdaya manusia pemerintah kabupaten Mandailing Natal memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada tetapi tidak didukung oleh pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan demikian akan lebih mempersulit dalam penyusunan laporan keuangan.

Tersedianya informasi tepat waktu dengan data yang akurat, strategis, taktis, tiap hari membuat manajemen dapat menggunakan informasi tersebut kapan saja dan menjadi masukan yang akurat terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, kinerja manajerial pengelolaan keuangan yang baik akan tercapai (Sari et al., 2017)

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Sari et al., 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian Adha Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem

pengendalian intern pemerintah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Dewi (2017) dan Syarifudin (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, baik dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangannya. Artinya pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal ditentukan dari bagaimana kompetensi SDM pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri.

4.2.7 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,045. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,464 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, tetapi tidak didukung dengan sistem pengendalian intern pemerintah maka Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal masih optimal. Hal ini dimungkinkan karena indikator pengukuran variabel sistem pengendalian intern pemerintah sudah mencakup dalam indikator pengukuran variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.

Nilai outer loading pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tertinggi terdapat pada indikator meningkatkan kinerja dengan nilai 0.885 dengan deskripsi jawaban responden penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada dengan 69.79% responden menjawab pernyataan baik.

Nilai outer loading sistem pengendalian intern pemerintah tertinggi terdapat pada indikator pemantauan dengan nilai 0.558 dengan deskripsi jawaban responden yang menyatakan bahwa pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan dengan 33.40% responden menjawab kurang baik.

Merujuk pada outer loading tertinggi tersebut, menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berjalan dengan baik tetapi tidak didukung oleh pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan demikian akan lebih mempersulit dalam penyusunan laporan keuangan.

SIKD dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas. Proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik terselenggara melalui pemerintah pusat dan daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi (Ahmad Yani, 2008).

Hal ini sejalan dengan penelitian Barus (2017), Jauhari & Hazisma (2021), Fathurrahman & Suwarno (2019), Arista (2018) dan Kapriana & Agung (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan di antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Saragih (2016) yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah mampu memoderasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, baik dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi pengaruh pemanfaatan SIKD terhadap kualitas laporan keuangannya. Artinya pengaruh pemanfaatan SIKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal ditentukan dari bagaimana pengaruh sistem informasi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

itu sendiri.

4.2.8 Pengaruh Peran APIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh peran auditor daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar -0,021. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,721 > 0,05$, berarti sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh peran auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan pengawasan melalui reviu atas LKPD masih kurang optimal karena reviu LKPD hanya dilakukan pada laporan keuangan OPD yang dinilai memiliki kelemahan SPIP yang tinggi yaitu laporan keuangan yang besar kemungkinan salah saji materil dan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan. Hal ini juga dimungkinkan karena indikator pengukuran variabel sistem pengendalian intern pemerintah sudah mencakup dalam indikator pengukuran variabel peran APIP.

Nilai outer loading peran APIP tertinggi terdapat pada indikator pengawasan administrasi pemerintah dengan nilai 0.889 dengan deskripsi jawaban responden inspektorat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah dan merekomendasikan solusi yang sesuaiatas permasalahan yang timbul

dengan 79,16% responden menjawab pernyataan baik.

Nilai outer loading sistem pengendalian intern pemerintah tertinggi terdapat pada indikator pemantauan dengan nilai 0.558 dengan deskripsi jawaban responden yang menyatakan bahwa pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan dengan 33.40% responden menjawab kurang baik.

Merujuk pada outer loading tertinggi tersebut, menunjukkan bahwa peran Inspektorat pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan pengawasan melalui reviu atas LKPD masih kurang optimal karena reviu LKPD hanya dilakukan pada laporan keuangan OPD yang dinilai memiliki kelemahan SPIP yang tinggi yaitu laporan keuangan yang besar kemungkinan salah saji materil dan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keusangan yang berkualitas dan andal

Hal ini sejalan dengan penelitian Aruan (2019), Syarifudin (2014) yang menyatakan bahwa SPIP tidak signifikan dalam pengaruh peran audit intern terhadap kualitas LKPD. Berbeda dengan penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan

variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh audit internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, baik dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah tidak mempengaruhi pengaruh peran APIP terhadap kualitas laporan keuangannya. Artinya pengaruh peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal ditentukan dari bagaimana peran APIP pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing?
7. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

8. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan peran APIP dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Melihat dari penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal yang menyebabkan seringnya terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan pemerintah kabupaten Mandailing Natal agar melaksanakan pelatihan penggunaan sistem akuntansi pemerintah sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Melihat dari kurangnya wawasan dalam menyusun laporan keuangan diaman SDM hanya menoton berdasarkan praktek yang dapat diterima secara umum sehingga laporan keuangan yang disusun kurang maksimal yang menyebabkan seringnya terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar melaksanakan pelatihan dan diklat serta studi banding kebeberapa daerah yang ada diluar kabupaten Mandailing Natal sehingga dapat menambah wawasan sumber daya manusia.

3. Melihat dari penggunaan teknologi informasi dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal yang menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang cukup. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan pemerintah kabupaten Mandailing Natal agar melaksanakan pelatihan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan
4. Melihat dari inspektorat sering menemukan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini inspektorat kabupaten Mandailing Natal sebagai APIP sebaiknya melakukan pembinaan ke seluruh OPD tanpa terkecuali, sehingga setiap OPD memperoleh pembinaan yang dapat meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir kemungkinan munculnya temuan permasalahan pada saat BPK melakukan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi sebaiknya dipantau proses tindaklanjutnya di OPD sehingga permasalahan yang ada benar-benar tuntas dapat diselesaikan.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh selain variabel sebelumnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menjadikan variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Adha Inapty, M. A. F. B. & Martiningsih, R. S. P. 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB)”, *Akuntabilitas*, 9(1), 1–26.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossiet, H. 2018. “Budget Process of Local Government in Indonesia”, *Bus. Econ. Res. Online*, 3(2), 2304-1013.
- Afiah, n. N., & azwari, p. C. 2015. “The effect of the implementation of government internal control sistem (gics) on the quality of financial reporting of the local government and its impact on the principles of good governance: a research in district, city, and provincial government in sou”. *Procedia - social and behavioral sciences*, 211, 811–818.
- Ahmad Yani. 2008. *Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andini, D. 2015. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24 No. 1*.
- Aruan, Hicca Maria Gandi Putri. 2019. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Variabel Moderating”, *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.
- Aryani, F. 2013. “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II. Universitas Sumatera Utara”, *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.
- Ayu, I., Kiranayanti, E., Made, N., & Erawati, A. 2016. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, *Jurnal Akuntansi*, 16, 1290–1318.
- Azlim, Darwanis, & Bakar, U. A. 2012. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164 1–14*.

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPK RI. 2022. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp>. Online, diakses tanggal 24 Februari 2022. Jakarta.
- BPK RI. 2022. <https://sumut.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lkpd/lkpd-kabupaten-mandailing-natal/>. Online, diakses tanggal 24 Februari 2022. Jakarta.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336.
- Desmaria Puji Kesuma, Anwar, C., & Darmansyah. 2017. “Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerjakementerian Pariwisata” *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika, Volume 141*.
- Dewi, J. P. 2017. ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi”, *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.
- Diani, D. I. 2014. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”, *Skripsi. Universitas Negeri Medan*.
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan : USU Press.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, Umar. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Ijeoma, n. B. 2014. “The impact of international public sector accounting standard (ipsas) on reliability, credibility and integrity of financial reporting in state government administration in nigeria”. *International journal of technology enhancements and emerging engineering research*, 2(3), 1–8.
- Inapty, M. Ali Fikri Biana dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9, no. 1 (2016): h. 27-42.

- Indonesia, R. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008*. (2008).
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic*, 3:305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perbendaharaan, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>, Online, diakses tanggal 24 Februari 2022.
- Korutaro nkundabanyanga, s., tauringana, v., balunywa, w., & naigo emitu, s. 2013. "The association between accounting standards, legal framework and the quality of financial reporting by a government ministry in uganda", *Journal of accounting in emerging economies*, 3(1), 65–81.
- Madina. 2022. <https://berita.madina.go.id/kabupaten-mandailing-natal-belum-terima-opini-wtp-bupati-harapkan-sinergitas-dan-kolaborasi-opd/>. Online, diakses tanggal 24 Februari 2022.
- Mahfud Sholihin dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0. Edisi Satu*. Jakarta: ANDI.
- Mihret, D. G., Grant, B. 2017. "The Role of Internal Auditing in Corporate Governance: A Foucauldian Analysis", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(3), 699-719.
- Muda, I., Haris Harahap, A., Erlina, E., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. 2018. "Factors of quality of financial report of local government in indonesia". *Iop conference series: earth and environmental science*, 126(1).
- Munasyir. 2015. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(4), 23–35.
- Rahmatika, D. N., & Afiah, N. N. 2014. "Factors Influencing the Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia)", *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 111–121.
- Rosalin, Faristina. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Di

Kota Semarang)’, *Skripsi. Universitas Diponegoro.*

- Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US.*
- Sholihin, Mahfud dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nirwana, H. 2018. “Determinant Factor of The Quality of Financial Statements and Performance of The Government by Adding Contextual Factors Personal Factors, Sistem/Administrative Factor”, *Asian Journal of Accounting Research 3(1), 28-40.*
- Nirwana, N. 2018. “The Effect of Human Capital on regional Financial Conditions Through Cultural Capital of Employes”. *International Journal of Law and Management, 60(4), 965-978.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah.*
- Rangkuti, Ahmad Zubeir. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi SIMDA Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”, *Skripsi. Universitas Sumatera Utara.*
- Rosidiani, H. T. 2011. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- S Purnomo, B. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 276.*
<https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>
- Saragih, D. Y. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Variabel Moderating”, *Tesis. Universitas Sumatera Utara.*

- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, P. K. A. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(110), 1–16.
- Sianturi, R. D. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Komitmen Pengguna Anggaran sebagai Variabel Moderating”, *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. 2012. “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”, *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Susanto, Heri., Eka Nurmala Sari., dan Maya Sari. 2021. “Factors Affecting the Quality of Financial Reports in the Government of Langkat Regency”, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences, Vol 4, No 4 (2021)*.
- Suwanda, D, 2015. “Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)”, *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Syarifudin, A. 2014. “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen)”, *Fokus Bisnis*, 14(25), 26–44.
- Tambingon, h. N., yadiati, w., & kewo, c. L. 2018. “Determinant factors influencing the quality of financial reporting local government in indonesia. *International journal of economics and financial issues*, 8(2), 262–268.
- The Institute of Internal Auditor. 1998. “Standards for The Professional Practice of Internal Auditing”, *The IIA*.
- Tim Penyusun STAN. 2007. *Dasar-Dasar Audit Internal Sektor Publik. Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik*. Jakarta: STAN.
- Ulfah, Yana dan Dhina Mustika Sari. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Samarinda)”, *Skripsi, Universitas Mulawarman*.

Umar, H. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.

Wati, Kadek Desiana, N. T. H. dan N. K. S. (2014). “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)*.

Wineh, Sri., Tommy Ferdian., dan Novianti. 2019. “Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Jambi)”, *Jurnal Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Kewirausahaan Vol 5, No 1 (2019)*

Yuesti, Anik., Dewi, Ni Luh Putu Sandrya., dan Pramesti, I Gusti Ayu Asri. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Bali : CV Noah Aletheia.

Yuliani, S., & Bakar, U. 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. (*Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh*). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.

Yosefrinaldi. 2013. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”, *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.